BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 311 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Bakesbangpol yang selanjutnya disebut Renstra Bakesbangpol adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Rencana Kerja Bakesbangpol yang selanjutnya disebut Renja Bakesbangpol adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP RENSTRA BAKESBANGPOL

Pasal 2

Dokumen Renstra Bakesbangpol merupakan dokumen perencanaan strategis Bakesbangpol untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Bakesbangpol yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Bakesbangpol yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Bakesbangpol bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Bakesbangpol dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Bakesbangpol dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Bakesbangpol agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Bakesbangpol;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Bakesbangpol;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Bakesbangpol.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA BAKESBANGPOL

Pasal 4

(1) Renstra Bakesbangpol Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Bakesbangpol dalam menyusun Renja Bakesbangpol.

(2) Renstra Bakesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
   1. latar Belakang;
   2. dasar hukum penyusunan;
   3. maksud dan tujuan; dan
   4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Bakesbangpol paling sedikit memuat:
   1. gambaran pelayanan Bakesbangpol; dan
   2. permasalahan dan isu strategis Bakesbangpol.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
   1. tujuan dan sasaran Renstra Bakesbangpol Tahun 2025-2029;
   2. strategi Bakesbangpol dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
   3. arah kebijakan Bakesbangpol dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
   1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
   2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
   3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Bakesbangpol; dan
   4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
   1. kesimpulan;
   2. kaidah pelaksanaan; dan
   3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Bakesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA BAKESBANGPOL

Pasal 5

(1) Bakesbangpol melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Bakesbangpol dan evaluasi hasil Renstra Bakesbangpol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Bakesbangpol terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Bakesbangpol.

(3) Kepala Bakesbangpol menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Bakesbangpol.

(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA BAKESBANGPOL

Pasal 6

Perubahan Renstra Bakesbangpol dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Bakesbangpol mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra Bakesbangpol dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan

c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Bakesbangpol, maka Renstra Bakesbangpol dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Bakesbangpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Bakesbangpol Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Bakesbangpol terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Bakesbangpol.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 311

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 311 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) adalah kerangka dasar yang menjembatani antara visi yang abstrak dengan situasi dan permasalahan yang nyata. Renstra berfungsi sebagai alat manajemen yang menjadi pembatas sekaligus petunjuk agar seluruh program dan kegiatan organisasi bersinergi dalam mencapai tujuan yang mengarah pada visi yang telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan program dan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif.

Renstra Bakesbangpol Kabupaten Bandung disusun untuk periode lima tahun (2025–2029) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kegiatan. Dokumen ini menjadi pedoman dan tolak ukur dalam melaksanakan amanat yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029, yang pada gilirannya selaras dengan RPJPD Kabupaten Bandung, RPJMN, serta RPJP Nasional.

Penyusunan Renstra juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta diperkuat oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025. Inmendagri tersebut menegaskan bahwa penyusunan RPJMD dan Renstra perangkat daerah harus diselaraskan dengan arah pembangunan nasional, ditetapkan dalam batas waktu yang jelas (RPJMD paling lambat 6 bulan setelah pelantikan kepala daerah, Renstra perangkat daerah paling lambat 1 bulan setelahnya), serta diintegrasikan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dengan adanya regulasi ini, Renstra tidak

hanya menjadi dokumen perencanaan teknis, tetapi juga instrumen strategis yang wajib dipenuhi oleh setiap perangkat daerah.

Dalam konteks pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Bandung, Renstra diarahkan untuk memperkuat ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM). Keberhasilan pembangunan bidang ini sangat ditentukan oleh kesinambungan program dan kegiatan dari periode sebelumnya. Oleh karena itu, penyusunan Renstra Bakesbangpol Kabupaten Bandung menjadi tahapan penting untuk memastikan konsistensi, kesinambungan, dan integrasi pembangunan daerah, arahan regulasi terbaru dari pemerintah pusat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis ini berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman hukum dan acuan operasional dalam merumuskan arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Landasan hukum ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyusunan Renstra dilaksanakan secara terarah, sistematis, akuntabel, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah. Adapun dasar hukum yang menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta Tata Cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
15. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2025 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Berdasarkan penjelasan di atas maksud disusunnya Renstra ini yaitu :

1. Sebagai acuan bagi Bakesbangpol Kabupaten Bandung dalam menentukan prioritas program lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam rencana pembangunan tahunan Daerah.
2. Sebagai pedoman bagi jajaran Bakesbangpol untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program Kepala Bakesbangpol selama lima tahunan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Bakesbangpol Tahun 2025-2029 di antaranya adalah :

1. Sebagai bagian dari RPJMD, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan selama 5 Tahunan.
2. Menjadi arah pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik, dengan fokus pada penguatan ideologi Pancasila, pembinaan politik, peningkatan partisipasi masyarakat, pencegahan konflik sosial, dan terjaganya kerukunan umat beragama.
3. Tolok ukur evaluasi kinerja tahunan**,** melalui indikator dan target kinerja yang terukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Sebagai pedoman aparatur Bakesbangpol, khususnya Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Politik Dalam Negeri, serta Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama, agar program dan kegiatan yang disusun lebih terarah, terukur, serta sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
5. Sebagai instrumen pemahaman arah kebijakan dan program lima tahunan, yang menjadi dasar bagi setiap bidang di Bakesbangpol dalam menyusun Renja tahunan, sekaligus memberi gambaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai arah pembinaan ideologi, politik, ormas, kerukunan umat beragama, serta pencegahan konflik sosial di daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

3.2 Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029

3.3 Penyajian Lokus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.4 Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, SubKegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

4.2 Uraian SubKegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 Melalui IKU PD

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui IKK

4.5 Uraian Indikator dan Target Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

4.6 Dukungan Terhadap Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029

BAB V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.2 Kaidah Pelaksanaan

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur PD

Bakesbangpol Kabupaten Bandung mempunyai tugas pokok merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjwabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri yaitu sebagai berikut:

Kepala Bakesbangpol dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

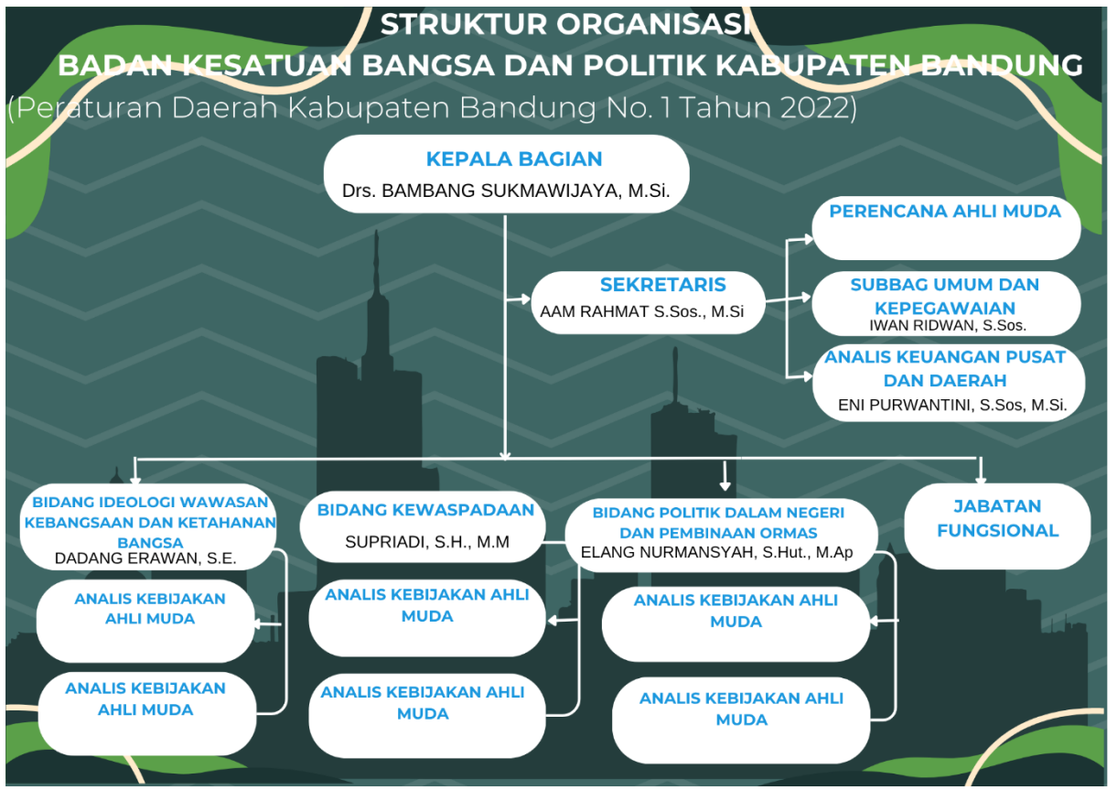
a. Perumus kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
c. Pembinaan dan pelakasanaan tugas sesuai dengan lingklup dan tugasnya.
d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung tentang tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 130 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penangangan konflik sosial di wilayah Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan

4. Pelaksanaan Kewaspadaan Wilayah Kabupaten sesuai nasional dan penanganan konflik sosial dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
5. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten dan FORKOPIMCAM
7. Pelaksanan administrasi kesekretariatan Bakesbangpol
8. Pelaksanaan fungsi yang lain diberikan oleh Bupati

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Sumber : Bagian Kepegawaian Bakesbangpol Tahun 2025

2.1.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Bakesbangpol diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan kedudukan tugas dan fungsi Bakesbangpol Kabupaten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bakesbangpol di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melaksanakan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten

Tabel 2. 1 Jabatan Struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Nama Jabatan
1	KEPALA BADAN
2	SEKRETARIS BADAN
3	KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN PEMBINAAN ORMAS
4	KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN BANGSA
5	KEPALA BIDANG KEWASPADAAN DAERAH
6	KEPALA SUB BIDANG BINA IDEOLOGI, KARAKTER BANGSA DAN BELA NEGARA
7	KEPALA SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA
8	KEPALA SUB BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
9	KEPALA SUB BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORMAS
10	KEPALA SUB BIDANG PENANGANAN KONFLIK, PEMANTAUAN ORANG/TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING
11	KEPALA SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI,KERJASAMA INTELIJEN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
12	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
13	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
14	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BADAN

Sumber : Bagian Kepegawaian Bakesbangpol, 2025

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

NO	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	PPPK	THL	
1	SD	0	0	0	0
2	SMP	1	0	0	1
3	SMA	1	0	2	3
4	D2	0	0	0	0
5	D3	1	0	1	2
6	D4	1	0	0	1
7	S1	6	5	2	13
8	S2	6	0	0	6
	JUMLAH	16	5	5	26

Sumber : Bagian Kepegawaian Bakesbangpol,2025

Jumlah pegawai pada Bakesbangpol sebanyak 26 orang, dengan rincian 16 orang berstatus PNS, 5 orang PPPK, dan 5 orang THL. Dari segi kualifikasi

pendidikan, sebagian besar pegawai telah berpendidikan tinggi, terdiri dari 13 orang lulusan S1 dan 6 orang lulusan S2, sedangkan sisanya berasal dari jenjang SMA, SMP, D3, dan D4. Komposisi ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia di lingkungan Bakesbangpol relatif didominasi oleh tenaga berpendidikan tinggi yang mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi strategis, meskipun masih terdapat pegawai dengan pendidikan menengah yang berperan dalam mendukung aspek teknis dan administratif.

2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

NO	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	PPPK	THL	
1	Laki-Laki	11	5	4	20
2	Perempuan	5	0	1	6
	JUMLAH	16	5	5	26

Sumber : Bidang Kepegawaian Bakesbangpol, 2025

Jumlah pegawai pada Bakesbangpol tercatat sebanyak 26 orang, terdiri dari 20 pegawai laki-laki dan 6 pegawai perempuan. Berdasarkan status kepegawaian, terdapat 16 orang berstatus PNS, 5 orang PPPK, dan 5 orang THL. Komposisi ini menunjukkan bahwa pegawai laki-laki mendominasi dengan jumlah 20 orang, sementara pegawai perempuan berjumlah 6 orang atau sekitar 23 persen dari total pegawai. Dominasi pegawai laki-laki terlihat pada seluruh status kepegawaian, baik PNS, PPPK, maupun THL, sedangkan keterwakilan perempuan masih relatif terbatas, terutama pada formasi PPPK yang belum terisi oleh pegawai perempuan.

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan Golongan Tahun 2025

NO	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	Jenis Kelamin		
			P	L	
1	Gol 1	1	-	1	1
2	Gol II	1	1	-	1
3	Gol III	10	3	7	10
4	Gol IV	4	1	3	4
	JUMLAH	16			16

Sumber : Bagian Kepegawaian Bakesbangpol Tahun 2025

Jumlah PNS pada Bakesbangpol Kabupaten Bandung sebanyak 16 orang, dengan mayoritas berada pada Golongan III sebanyak 10 orang, disusul Golongan IV sebanyak 4 orang, serta masing-masing 1 orang pada Golongan I dan II. Dari sisi gender, terdapat 11 pegawai laki-laki dan 5 pegawai perempuan. Komposisi ini menunjukkan bahwa pegawai didominasi oleh Golongan III sebagai jenjang menengah, sementara jumlah pegawai pada golongan tinggi

masih terbatas, serta keterwakilan perempuan relatif lebih sedikit dibanding laki-laki.

2.1.2.2 Rekapitulasi Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 2. 4 Rekapitulasi Barang Inventaris Bakesbangpol Kabupaten Bandung 2024

NO.	JENIS ASET	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN SD 31 DESEMBER 2024	NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2024
1	Tanah	-		-
2	Peralatan dan Mesin	2,660,528,200	1,686,580,568	973,947,632
3	Gedung dan Bangunan	2,791,713,085	686,822,174	2,104,890,911
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-		-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan			
	Total Aset Tetap	5,452,241,285	2,373,402,742	3,078,838,543
7	Aset Tak Berwujud			-
8	Aset Lain-Lain/Rusak Berat	193,583,000	191,548,000	2,035,000
9	Aset yang dimanfaatkan pihak lain			-
	Total Aset Lainnya	193,583,000	191,548,000	2,035,000
	Total Aset Tetap + Aset Lainnya	5,645,824,285	2,564,950,742	3,080,873,543

Sumber : Bagian Aset/BMD Bakesbangpol 2024

Berdasarkan kondisi aset per 31 Desember 2024, total aset tetap yang dimiliki Bakesbangpol Kabupaten Bandung tercatat sebesar Rp5.452.241.285 dengan akumulasi penyusutan Rp2.373.402.742, sehingga nilai buku yang masih tersisa adalah Rp3.078.838.543. Komponen terbesar berasal dari gedung dan bangunan dengan nilai buku Rp2.104.890.911, menunjukkan bahwa aset fisik penunjang pelayanan masih terjaga dengan baik. Sementara itu, peralatan dan mesin memiliki nilai buku Rp973.947.632 dari total saldo Rp2.660.528.200, namun telah mengalami penyusutan cukup tinggi sehingga memerlukan perhatian dalam peremajaan dan pemeliharaan. Adapun aset lain-lain atau rusak berat tercatat Rp193.583.000 dengan nilai buku hanya Rp2.035.000, menandakan bahwa aset tersebut sudah hampir tidak memiliki manfaat ekonomis. Secara keseluruhan, total aset tetap dan aset lainnya mencapai Rp5.645.824.285 dengan nilai buku Rp3.080.873.543.

Tabel 2. 5 Klasifikasi BMD

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bandung

Klasifikasi BMD : Peralatan & Mesin

NO	NAMA/JENIS BARANG	No Reg.	MERK/ TYPE	UKURAN/ CC	VOLUME	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	4	5	6		14	15	16	17
1	Alat Podcast dan Vlog, Mic Podcast		Ashley		1	set	5,050,000	5,050,000
2	Monitor Speaker System		Sony		1	Unit	7,800,000	7,800,000
3	Paket CCTV 16 Chanel		XVR		16	Set	890,625	14,250,000
4	Camera		Canon EOS 6D Mark II ; EF 50 MM F\18STM		1	Unit	38,000,000	38,000,000
5	Tripod Camera		K&F Concept BH28L		1	Buah	2,300,000	2,300,000
6	Handy Talky (HT)		Icom		5	Unit	2,300,000	11,500,000
7	Laptop		Lenovo Ideapad Flex		5	Unit	17,850,000	89,250,000
8	PC. Komputer		Asus AIQ core i7 all in one		6	Unit	17,300,000	103,800,000
9	Printer		Epson L6290		3	Unit	7,600,000	22,800,000
10	Scaner		Epson DS410		2	Unit	8,100,000	16,200,000
11	AC Split Wall 1PK		Sharp		6	Unit	5,100,000	30,600,000
12	Dispenser		Politron Galon Bawah		6	Unit	4,000,000	24,000,000
13	Televisi		TOSHIBA Smart TV LED 65"		2	Unit	18,100,000	36,200,000
14	Filing Kabinet		VIP		2	Buah	3,090,300	6,180,600
15	Kursi Kerja		Lokal		20	Buah	1,125,000	22,500,000
16	Kursi Tamu Sofa		Lokal		1	Set	12,850,000	12,850,000
17	Lemari Besi kaca		VIP		2	Buah	3,459,700	6,919,400
18	Lemari Arsip		VIP		7	Buah	5,400,000	37,800,000
19	Penampung air (Torn)		Penguin		2	Buah	2,110,000	4,220,000

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bandung

Klasifikasi BMD : Peralatan & Mesin

NO	NAMA/JENIS BARANG	No Reg.	MERK/ TYPE	UKURAN/ CC	VOLUME	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
20	Mesin Potong Rumput		Motoyama TR 440 4Tak		2	Buah	5,500,000	11,000,000
21	Kursi Kerja Pejabat		Chitose		1	Buah	6,000,000	6,000,000
22	Meja Kerja Pejabat		Informa		1	Buah	12,000,000	12,000,000
23	Kursi Tamu Sofa Besar		Zenna		1	Set	36,000,000	36,000,000
24	Kursi tamu Sofa		Lokal		1	set	12,500,000	12,500,000
25	PC. Komputer		Asus AIO core i7 all in one		5	Unit	19,000,000	95,000,000
26	Printer		Epson L6290		5	Unit	7,500,000	37,500,000
27	Speaker Portable		Bare Tone		3	Unit	8,400,000	25,200,000
28	Tas Kamera		KNF Concept		1	Buah	2,250,000	2,250,000
29	Wirless Clip-On Ultracompact 2		Saramonic		1	Unit	4,000,000	4,000,000
30	Lensa Kamera		Canon Lensa EF-S18-135MM		1	Unit	20,200,000	20,200,000

Sumber : Bagian Aset/BMD Bakesbangpol Kab Bandung Tahun 2024

Berdasarkan data klasifikasi Barang Milik Daerah (BMD), Bakesbangpol Kabupaten Bandung memiliki beragam peralatan dan mesin yang digunakan sebagai sarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Aset tersebut meliputi perangkat teknologi informasi seperti laptop, komputer, printer, scanner, hingga perangkat audio visual berupa kamera, alat podcast, CCTV, televisi, dan sistem speaker yang berfungsi mendukung dokumentasi kegiatan, komunikasi publik, serta penguatan literasi politik masyarakat. Selain itu, terdapat sarana perkantoran berupa meja, kursi, *filing cabinet*, lemari arsip, dan pendingin ruangan yang berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang tertib, nyaman, dan produktif. Beberapa peralatan lapangan seperti *handy talky*, tripod, dan tas kamera juga dimanfaatkan untuk mendukung koordinasi, kewaspadaan dini, serta pelaporan kondisi lapangan.

Dari sisi nilai, inventaris peralatan dan mesin menunjukkan investasi yang cukup signifikan, namun sebagian aset telah mengalami penyusutan sehingga ke depan diperlukan pemeliharaan rutin, peremajaan, dan pengadaan baru sesuai kebutuhan organisasi. Kondisi ini sejalan dengan arah Renstra

Bakesbangpol Tahun 2025–2029 yang menekankan pentingnya modernisasi perangkat teknologi, digitalisasi arsip dan pelayanan, serta penguatan sarana pendukung kewaspadaan dini dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan. Dengan pengelolaan aset yang optimal, diharapkan Bakesbangpol dapat meningkatkan efektivitas pelayanan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menunjang pencapaian sasaran strategis bidang kesatuan bangsa dan politik secara berkelanjutan.

Tabel 2. 6 Daftar Inventaris Aset

NO	NAMA/JENIS BARANG	No Reg.	TAHUN PEROLEHAN	MERK/ TYPE	VOLUME	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	Kursi lipat	103	2007	CHITOS	1	Buah	302,800	302,800	
2	Kursi lipat	104	2007	CHITOS	1	Buah	302,800	302,800	
3	Kursi lipat	105	2007	CHITOS	1	Buah	302,800	302,800	
4	Kursi lipat	106	2007	CHITOS	1	Buah	302,800	302,800	
5	Kursi lipat	107	2007	CHITOS	1	Buah	302,800	302,800	
6	Kursi lipat	108	2007	CHITOS	1	Buah	302,800	302,800	
7	Kursi lipat	109	2007	CHITOS	1	Buah	302,800	302,800	
8	Kursi lipat	110	2007	CHITOS	1	Buah	302,800	302,800	
9	Kursi lipat	111	2007	CHITOS	1	Buah	302,800	302,800	Reklas dari Kib B
10	Kursi lipat	112	2007	CHITOS	1	Buah	302,800	302,800	
11	Kursi lipat	113	2007	CHITOS	1	Buah	302,800	302,800	
12	Kursi lipat	114	2007	CHITOS	1	Buah	302,800	302,800	
13	Kursi lipat	115	2007	CHITOS	1	Buah	302,800	302,800	
14	Kursi lipat	116	2007	CHITOS	1	Buah	302,800	302,800	
15	Kursi lipat	117	2007	CHITOS	1	Buah	302,800	302,800	
16	Kursi lipat	118	2007	CHITOS	1	Buah	302,800	302,800	
17	Kursi lipat	119	2007	CHITOS	1	Buah	302,800	302,800	
18	Kursi lipat	120	2007	CHITOS	1	Buah	302,800	302,800	
19	Kursi lipat	121	2007	CHITOS	1	Buah	302,800	302,800	

NO	NAMA/JENIS BARANG	No Reg.	TAHUN PEROLEHAN	MERK/ TYPE	VOLUME	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
20	Televisi	007	2019	SAMSUNG LED 43"	1	Unit	7,850,000	7,850,000	
1	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1	12/31/2005	BROTHER	1	Buah	2,794,000	2,794,000	
2	Televisi	1	12/31/2005	KONKA	1	Unit	8,209,300	8,209,300	
3	Dispenser	3	12/31/2013	POLYTRON	1	Buah	1,000,000	1,000,000	
4	Dispenser	4	12/31/2013	POLYTRON	1	Buah	1,000,000	1,000,000	
5	Dispenser	5	12/31/2013	POLYTRON	1	Buah	1,000,000	1,000,000	
6	P.C Unit	2	12/31/2007	LG	1	Unit	11,037,000	11,037,000	
7	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	12/31/2012	Epson L350	1	Buah	3,750,000	3,750,000	Penghapusan/lelang No. 000.2/Kep.5-BKAD/2024 tgl 12 jan 2024
8	Papan Visual/Papan Nama	1	11/2/2015	LOKAL	1	Buah	500,000	500,000	
9	Papan Visual/Papan Nama	2	11/2/2015	LOKAL	1	Buah	500,000	500,000	
10	Papan Visual/Papan Nama	3	11/2/2015	LOKAL	1	Buah	500,000	500,000	
11	Papan Visual/Papan Nama	4	11/2/2015	LOKAL	1	Buah	500,000	500,000	
12	Papan Visual/Papan Nama	5	11/2/2015	LOKAL	1	Buah	500,000	500,000	
s	Papan Visual/Papan Nama	6	11/2/2015	LOKAL	1	Buah	500,000	500,000	
14	Papan Visual/Papan Nama	7	11/2/2015	LOKAL	1	Buah	500,000	500,000	
15	Papan Visual/Papan Nama	8	11/2/2015	LOKAL	1	Buah	500,000	500,000	

NO	NAMA/JENIS BARANG	No Reg.	TAHUN PEROLEHAN	MERK/ TYPE	VOLUME	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
16	Papan Visual/Papan Nama	9	11/2/2015	LOKAL	1	Buah	500,000	500,000	
17	Papan Visual/Papan Nama	10	11/2/2015	LOKAL	1	Buah	500,000	500,000	
18	Papan Visual/Papan Nama	11	11/2/2015	LOKAL	1	Buah	500,000	500,000	
19	Papan Visual/Papan Nama	12	11/2/2015	LOKAL	1	Buah	500,000	500,000	

Sumber : Bagian Aset/BMD Bakesbangpol Kab.Bandung Tahun 2024

Berdasarkan data inventaris, sebagian besar aset peralatan dan mesin Bakesbangpol Kabupaten Bandung, seperti kursi kerja (2007), mesin ketik (2005), komputer (2007), dan dispenser, sudah berusia lama dan berpotensi menurun fungsinya. Beberapa aset bahkan sudah tercatat untuk dihapus, seperti papan visual/papan nama tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan perlunya peremajaan dan pengadaan sarana baru yang lebih modern.

Dalam Renstra 2025–2029, arah pengelolaan aset difokuskan pada tiga hal: (1) inventarisasi dan penghapusan aset tidak layak, (2) pemeliharaan peralatan yang masih berfungsi, serta (3) pengadaan sarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung pelayanan publik dan kewaspadaan dini. Dengan langkah ini, Bakesbangpol diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja, akuntabilitas, serta menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan masa kini.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.1.3.1 Data-Data dan Informasi terkait Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab Bakesbangpol

Bakesbangpol Kabupaten Bandung memberikan sejumlah layanan baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol Kabupaten Bandung.

1. Pelayanan Internal
   a. Penyusunan perencanaan anggaran program, kegiatan Badan;
   b. Pengelolaan inventarisir, pelaporan, dan pemeliharaan data aset Badan;
   c. Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program Badan;
   d. Penyusunan perbendaharaan keuangan Badan;

e. Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
f. Pengelolaan data kepegawaian Badan;
g. Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;

2. Pelayanan Eksternal
a. Memberikan perizinan mahasiswa yang mengadakan penelitian;
b. Memfasilitasi ormas untuk mendapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada ormas;
c. Fasilitasi terhadap kegiatan Forum Komite Pimpinan Daerah (Forkopimda);
d. Memfasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
e. Memfasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
f. Memfasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
g. Memfasilitasi layanan organisasi kemasyarakatan;
h. Memfasilitasi organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.

2.1.3.2 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2020-2024

Tabel 2. 7 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian					KET.
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Nilai Sakip Badan Kesbangpol	Persen	70%	-	70,20%	71,20%	81,25%	
2	Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik	persen	n/a	-	95.00%	96.00%	92,97%	
3	Persentase Pengendalian Penanganan Potensi Konflik		72%		72,5%	73	79,40 %	Jumlah konflik yang di tangani/jumlah konflik yang terjadi X 100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,2024

Kinerja pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Bandung diukur dari tercapainya indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah yang ditetapkan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja Badan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Apabila target dari indikator kinerja 28 sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat dicapai, maka kinerja pelayanan Bakesbangpol Kabupten Bandung dapat dikategorikan baik, Dalam masa Pencapaian indikator kinerja periode tahun 2025-2029.

Capaian kinerja Bakesbangpol Kabupaten Bandung pada periode 2020–2024 menunjukkan tren yang cukup positif. Nilai SAKIP terus mengalami peningkatan dari 70% di tahun 2020 hingga mencapai 81,25% pada tahun 2024, yang mencerminkan perbaikan akuntabilitas kinerja

instansi. Persentase BMD/Aset dalam kondisi baik sempat mencatat hasil tinggi sejak 2022 dengan 95% dan 96% pada 2023, namun sedikit menurun menjadi 92,97% di tahun 2024, sehingga pengelolaan aset masih perlu ditingkatkan agar kualitasnya tetap terjaga. Sementara itu, indikator pengendalian dan penanganan potensi konflik menunjukkan peningkatan bertahap dari 72% di tahun 2020 hingga 79,40% pada 2024, menandakan semakin efektifnya upaya Bakesbangpol dalam menjaga kondusivitas daerah. Secara keseluruhan, capaian ini memberikan gambaran adanya kemajuan kinerja, meskipun tetap diperlukan perhatian khusus pada aspek pengelolaan aset agar tidak mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya.

2.1.3.3 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang Menjadi Tanggung Jawab Bakesbangpol pada Renstra Tahun 2021-2026 Mencakup Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Tabel 2. 8 Hasil Evaluasi Capaian Kinerja

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	%
		2021		2022		2023		2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	Urusan Penunjang									
8.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		17,933,802,743.00		23,049,127,720.00		43,043,718,974.00		169,640,758,031	97.81%
4.12.0.00.0.00.12.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		17,933,802,743.00		23,049,127,720.00		43,043,718,974.00		169,640,758,031	97.81%
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6,782,844,443.00	83,61%	6,805,803,460.00		6,319,605,537.00	81,25%	9,469,207,586	89,81%
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		79,486,200.00	90,57%	31,699,400.00		25,999,800.00	100%	199,501,730	99,72%
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	19,919,900.00	4 Dokumen	5,000,000.00	4 Dokumen	5,000,000.00	4 Dokumen	10,000,000	99,72%
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4,999,800.00	2 Dokumen	3,499,800.00	2 Dokumen	3,499,800.00	2 Dokumen	11,500,000	100.00 %
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	1,999,900.00	1 Dokumen	2,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000	100.00 %
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	4,952,000.00	2 Dokumen	2,000,000.00	2 Dokumen	2,000,000.00	2 Dokumen	10,000,000	100.00 %
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000.00	2 Dokumen	3,499,800.00	2 Dokumen	3,500,000.00	2 Dokumen	10,000,000	100.00 %
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	9,999,900.00		9,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	66,999,580	99,72%
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	29,614,600.00	10 Dokumen	6,699,900.00	2 Dokumen	5,000,000.00	10 Dokumen	81,002,150	100.00 %
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5,567,755,349.00		5,264,811,449.00		5,240,643,913.00	100%	5,776,995,352	99,72%
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	5,533,539,249.00	12 Bulan	5,241,811,749.00	12 Bulan	5,225,643,913.00	12 Bulan	5,721,420,352	86,80%
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	13,635,600.00		12,999,900.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	25,575,000	86,80%
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	20,580,500.00		9,999,800.00	2 Dokumen	10,000,000.00	2 Dokumen	30,000,000	100.00 %
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		35,960,000.00		14,965,000.00		9,995,000.00	100%	123,674,800	99.96%
8.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	34 Orang	35,960,000.00	34 Orang	14,965,000.00	28	9,995,000.00		-	-

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	%
		2021		2022		2023		2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		-	-	-		-	35 Orang	83,697,000	99.96%
8.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-		-	35 Orang	39,319,000	99.96%
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		569,455,929.00		788,191,500.00		480,642,876.00	100%	1,370,241,998	97,98%
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41 Jenis	146,354,851.00	35 Jenis	111,691,000.00	35 Jenis	271,782,400.00	35 Jenis	578,369,700	97,98%
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10 Jenis	5,256,000.00	10 Jenis	301,924,500.00	8 Jenis	17,407,200.00	10 Jenis		97,98%
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	780 Ok	62,635,000.00	780 HOK	88,990,000.00	250 HOK	9,975,000.00	780 HOK	105,394,200	97,98%
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14 Buah	41,754,725.00	14 Buah	40,972,000.00	14 Buah	40,000,000.00	14 Buah	95,923,400	100.00 %
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Jenis	16,590,000.00		10,000,000.00	4 Jenis	2,937,000.00	4 Jenis	19,971,000	97,98%
8.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	10 Jenis	54,207,700.00	10 Jenis	49,986,000.00	-		0 Jenis	-	0.00%
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	908 HOK	242,657,653.00	264 HOK 190 HOK 454 HOK	184,628,000.00	400 HOK	138,541,276.00	264 HOK 190 HOK 454 HOK	301,154,598	97,98%
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		257,901,390.00		393,765,878.00		314,327,870.00	100%	1,188,299,157	94.18%
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Buah	7,890,000.00	400 Buah	4,994,000.00	400 Buah	4,997,200.00	400 Buah	20,000,000	100.00 %
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	24,349,534.00		23,908,094.00	3 Jenis	28,795,870.00	3 Jenis	35,085,317	66.55%
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	225,661,856.00	14 Bulan	364,863,784.00	12 Bulan	280,534,800.00	14 Bulan	1,133,213,840	98.27%
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		272,285,575.00		312,370,233.00		247,996,078.00	100%	1,133,213,840	97,60%
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 Unit	82,938,275.00		77,664,949.00	9 Unit	98,311,904.00	9 Unit	54,221,500	97,60%
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18 Unit	40,000,000.00	18 Unit	35,000,000.00	18 Unit	50,000,000.00	18 Unit	125,736,900	97,60%
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18 Jenis dan Jasa	149,347,300.00	18 Jenis	199,705,284.00	1 Unit	99,684,174.00	1 Unit	630,536,149	97,60%
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		280,697,500.00		306,432,500.00		1,021,293,075.00	87,51%	2,168,896,055	87,51%
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	280 Orang	280,697,500.00					3 Kegiatan	2,168,896,055	87,51%
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		280,697,500.00	120 Orang 50 Orang 45 Orang 65 Orang	306,432,500.00	280	1,021,293,075.00	120 Orang 50 Orang 45 Orang 65 Orang	929,681,050	87,51%
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka		-	-				35 Orang	1.239.215.005	87,51%
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		3,348,708,500.00	82,38%	5,300,022,870.00		23,932,101,632.00	98,88%	135,835,712,878	98.88%

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	%
		2021		2022		2023		2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan		3,348,708,500.00		5,300,022,870.00		23,932,101,632.00	15 Kegiatan	135,835,712,878	99,66%
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	8 Parpol dan 500 Orang	3,348,708,500.00	8 Parpol; 500 Orang	5,279,982,870.00	250 Orang	23,908,551,632.00	500 Orang	135,818,012,878	99,66%
	Pelaksanaan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Politik , Etika Budaya Politik , Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan		-	3 Laporan	20,040,000.00	3 Laporan	23,550,000.00	3 Laporan	17,700,000	99,66%
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		1,352,436,900.00		1,117,080,260.00		6,449,321,530.00	82,04%	2861598080	82,04%
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		1,352,436,900.00					10 Kegiatan	2861598080	82,04%
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang dan 22 Ormas	1,342,437,100.00	200 Orang	1,109,220,260.00	200 Orang	6,440,901,530.00	200 Orang	2,855,988,080	82,04%
	Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Pimpinan	3 Laporan	9,999,800.00	-	-		-		-	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		-	3 Laporan	7,860,000.00	3 Laporan	8,420,000.00	3 Laporan	5,610,000	82,04%
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		403,697,900.00		430,653,986.00		147,436,000.00	84,17%	733333800	84,17%
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		403,697,900.00					3 Kegiatan	733333800	84,17%
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	490 Orang	403,697,900.00	50 Orang 100 orang 80 Orang 160 Orang 100 Orang	430,653,986.00	400 Orang	147,436,000.00	50 Orang 100 Orang 80 Orang 160 Orang 100 Orang	733,333,800	84,17%
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		5,765,435,500.00		9,089,134,644.00		5,173,961,200.00	93,95%	18572009632	93.95%

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	%
		2021		2022		2023		2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		5,765,435,500.00					13 Kegiatan	18572009632	93.95%
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah	300 Orang dan 32 Laporan	3,613,968,300.00	300 Orang 32 Laporan	5,603,179,644.00	100 Orang	839,002,600.00	300 Orang 32 Laporan	11,543,963,432	93.95%
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	92 Laporan dan 3 Dokumen	1,920,150,000.00	3 Dokumen 92 Laporan	3,352,125,000.00	30 Laporan	3,312,685,000.00	3 Dokumen 92 Laporan	6,516,483,800	93.95%
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		-	15 Laporan	6,880,000.00	15 Laporan	8,170,000.00	15 Laporan	46,520,000	93.95%
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	231,317,200.00	12 Bulan	126,950,000.00	12 Bulan	1,014,103,600.00	12 Bulan	465,042,400	93.95%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2024

Berdasarkan tabel capaian kinerja dan realisasi anggaran, terlihat bahwa secara umum Bakesbangpol Kabupaten Bandung telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan tingkat capaian kinerja yang cukup baik. Sebagian besar kegiatan menunjukkan capaian kinerja di atas 90%, bahkan terdapat beberapa yang mencapai 100% seperti kegiatan koordinasi, fasilitasi, dan penyusunan dokumen strategis. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja yang direncanakan dapat direalisasikan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup tinggi, meskipun terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya lebih rendah dari pagu anggaran. Namun, pada sejumlah program lain, capaian kinerja tetap dapat optimal meskipun realisasi anggaran tidak sepenuhnya terserap. Kondisi ini mencerminkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran, meskipun di sisi lain perlu evaluasi lebih lanjut agar alokasi yang tersedia dapat dimanfaatkan lebih maksimal.

Secara khusus, kegiatan yang berhubungan dengan penguatan wawasan kebangsaan, pencegahan konflik, dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan menunjukkan tren capaian kinerja yang konsisten. Misalnya, kegiatan koordinasi dan fasilitasi perencanaan kebijakan daerah, serta sosialisasi kebijakan bidang politik dan pemerintahan, memiliki capaian mendekati atau sama dengan target. Hal ini sejalan dengan peran Bakesbangpol sebagai institusi yang berfungsi menjaga stabilitas politik, ketertiban umum, dan mendukung partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa kinerja Bakesbangpol Kabupaten Bandung dalam kurun waktu pelaksanaan program sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD. Meski demikian, masih diperlukan penguatan dalam hal optimalisasi penyerapan anggaran, serta evaluasi terhadap beberapa kegiatan yang capaian dan realisasinya belum maksimal agar ke depan dapat lebih efektif dan memberikan dampak nyata terhadap masyarakat.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas daerah, Bakesbangpol Kabupaten Bandung diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis, menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta membangun kesadaran politik masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bakesbangpol menetapkan kelompok sasaran pelayanan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Bakesbangpol Kabupaten Bandung memiliki kelompok sasaran pelayanan yang luas dan beragam, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, serta memperkuat kehidupan demokrasi. Sasaran utama pelayanan meliputi masyarakat secara umum, organisasi kemasyarakatan, lembaga politik, lembaga pendidikan, komunitas pemuda, tokoh masyarakat, serta aparatur pemerintahan di tingkat daerah.

Bagi masyarakat umum, layanan Bakesbangpol diarahkan pada peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara, penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan, serta pendidikan politik yang mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, fasilitasi pendidikan politik, dan pembinaan masyarakat agar mampu berperan aktif dalam menjaga stabilitas daerah.

Organisasi kemasyarakatan (ormas) dan lembaga keagamaan menjadi sasaran penting lainnya, mengingat peran strategis mereka

dalam membangun solidaritas sosial, mencegah potensi konflik, serta memperkuat kebersamaan. Bakesbangpol memberikan layanan berupa verifikasi, pendaftaran, serta pembinaan ormas, termasuk fasilitasi dalam pelaporan kegiatan agar ormas lebih transparan, tertib, dan sejalan dengan peraturan perundangan.

Partai politik juga menjadi sasaran layanan yang krusial, terutama dalam mendukung tata kelola partai yang sehat dan demokratis. Bakesbangpol berperan memfasilitasi pendidikan politik, pengelolaan bantuan keuangan partai politik, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas parpol sebagai pilar demokrasi daerah.

Selain itu, kalangan pemuda, pelajar, dan mahasiswa menjadi kelompok sasaran melalui program pengembangan wawasan kebangsaan dan penanaman nilai nasionalisme. Program ini diarahkan untuk membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran politik, tangguh terhadap pengaruh negatif, serta berkomitmen menjaga persatuan bangsa.

Tokoh masyarakat, tokoh agama, serta forum-forum komunikasi lintas etnis dan budaya juga menjadi mitra sekaligus sasaran pelayanan. Melalui peran mereka, Bakesbangpol memperkuat kolaborasi multi pihak dalam pencegahan konflik sosial, pembinaan kerukunan umat beragama, serta pembangunan partisipasi aktif dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

Terakhir, aparatur pemerintahan baik di tingkat kecamatan maupun desa turut menjadi sasaran pembinaan. Hal ini dilakukan agar koordinasi, sinkronisasi, serta implementasi kebijakan politik dan keamanan daerah dapat berjalan terpadu, sehingga pelayanan publik di bidang ketenteraman dan ketertiban dapat dirasakan lebih nyata oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, kelompok sasaran pelayanan Bakesbangpol mencakup seluruh elemen masyarakat, mulai dari individu, organisasi, hingga institusi pemerintahan. Pelayanan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga menyentuh aspek edukatif, preventif, dan kolaboratif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang tenteram, demokratis, dan berkesinambungan.

Kelompok sasaran pelayanan Bakesbangpol mencakup berbagai elemen masyarakat, organisasi, serta lembaga pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan urusan kesatuan bangsa dan politik. Secara lebih rinci, kelompok sasaran tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa
   - Peserta didik, mahasiswa, dan generasi muda melalui program pembinaan wawasan kebangsaan, bela negara, dan pembentukan karakter.
   - Forum pembauran kebangsaan (FPK), Forum kerukunan umat beragama (FKUB, organisasi kepemudaan, organisasi wanita, dan tokoh masyarakat yang berperan sebagai agen penguat ideologi Pancasila dan persatuan nasional.
2. Bidang Politik Dalam Negeri
   - Partai politik, sebagaida penerima layanan fasilitasi pendidikan politik, bantuan keuangan, dan pembinaan kelembagaan.
   - Masyarakat pemilih, dalam rangka meningkatkan partisipasi politik dan kualitas demokrasi di daerah.
   - Penyelenggara pemilu/pilkada serta lembaga pengawas, yang memerlukan sinergi dengan pemerintah daerah dalam menjaga kondusivitas penyelenggaraan pesta demokrasi.
3. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama
   - Organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga adat, dan lembaga keagamaan, sebagai penerima layanan pendaftaran, pelaporan, dan fasilitasi kegiatan.
   - Tokoh adat, tokoh agama, serta komunitas masyarakat dalam upaya menjaga kerukunan, toleransi, dan harmoni sosial.
4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
   - Aparatur pemerintah daerah, perangkat kecamatan/kelurahan, dan lembaga vertikal dalam koordinasi deteksi dini, cegah dini, dan pengendalian konflik sosial.
   - Forum-forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM), serta organisasi yang terlibat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.
5. Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga
   - Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas daerah.
   - Lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan komunitas strategis lainnya yang berperan dalam memperkuat kohesi sosial dan ketahanan nasional.

Dengan demikian, kelompok sasaran pelayanan Bakesbangpol tidak terbatas pada masyarakat umum, melainkan juga mencakup organisasi, lembaga, dan institusi yang memiliki kontribusi terhadap terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harmonis, demokratis, serta kondusif bagi pembangunan daerah.

2.1.5 Mitra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang efektif, inklusif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, Bakesbangpol Kabupaten Bandung membangun dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Kemitraan tersebut tidak hanya bersifat koordinatif, tetapi juga diarahkan untuk membentuk pola kerja kolaboratif yang berkelanjutan. Mitra strategis Bakesbangpol meliputi perangkat daerah terkait, lembaga vertikal seperti TNI, Polri, dan instansi kementerian di daerah, lembaga pendidikan dan perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, media massa, serta komunitas kewarganegaraan dan demokrasi lokal.

Kolaborasi dengan mitra ini berperan penting dalam pelaksanaan berbagai program, antara lain penyebarluasan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, fasilitasi pendidikan politik masyarakat, pembinaan organisasi kemasyarakatan, serta deteksi dan pencegahan potensi konflik sosial. Melalui jaringan kemitraan tersebut, Bakesbangpol memperoleh dukungan data, sumber daya manusia, sarana informasi, serta akses langsung kepada masyarakat sehingga proses pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih cepat, tepat sasaran, dan adaptif terhadap dinamika sosial politik di daerah.

Selain itu, pola kemitraan ini juga mendorong terciptanya ruang dialog dan koordinasi lintas sektor yang berfungsi sebagai forum komunikasi dan penyelesaian masalah secara partisipatif. Dengan demikian, keberadaan mitra tidak hanya diposisikan sebagai pihak pendukung, tetapi menjadi bagian integral dari strategi Bakesbangpol dalam memperkuat stabilitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Kabupaten Bandung. Kemitraan yang terstruktur dan berkesinambungan ini menjadi salah satu fondasi penting dalam pelaksanaan pelayanan publik yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada penguatan ketahanan sosial politik daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Bandung, Bakesbangpol memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas daerah, memperkuat ketahanan ideologi, dan mendorong partisipasi politik masyarakat secara sehat dan berkeadaban. Selama periode perencanaan 2025–2029, tugas dan fungsi Bakesbangpol diarahkan untuk mendukung tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan. Berbagai program dan pelayanan telah dilaksanakan, namun dalam implementasinya masih ditemui sejumlah

kendala baik dari sisi pelaksanaan teknis maupun kapasitas kelembagaan yang menyebabkan optimalisasi kinerja belum sepenuhnya tercapai.

Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Dari sisi internal, kesiapan sumber daya manusia, kebutuhan penguatan sistem informasi dan basis data, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung menjadi tantangan utama dalam mendukung pelaksanaan tugas secara efektif. Koordinasi antar perangkat daerah dan mitra strategis juga masih memerlukan penguatan agar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila, pengawasan organisasi kemasyarakatan, deteksi dini potensi konflik, dan pendidikan politik masyarakat dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.

Sementara dari sisi eksternal, dinamika sosial masyarakat yang semakin kompleks, munculnya potensi kerawanan sosial, pengaruh informasi digital yang cepat dan tidak selalu akurat, serta masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi substantif menjadi isu strategis yang harus direspons secara adaptif oleh Bakesbangpol. Tantangan ini menuntut kehadiran peran Bakesbangpol yang lebih proaktif, responsif, dan mampu membangun sinergi dengan berbagai pihak untuk memastikan kondusifitas wilayah dan penguatan jati diri kebangsaan masyarakat Kabupaten Bandung.

Tantangan tersebut, ada peluang yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas Bakesbangpol Kabupaten Bandung.

1. Sinergitas Pemerintah Daerah dengan TNI, Polri, Kejari, Kemenag yang semuanya berposisi wilayah Kabupaten Bandung terutama melalui Forkopimda untuk mewujudkan kabupaten yang kondusif dalam melakukan pembangunan.
2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat diiringi dengan program *smart city* dengan *leading sectornya* adalah DISKOMINFO.
3. Setiap kegiatan yang dilakukan Ormas yang ada diwilayah Kabupaten Bandung, selalu melibatkam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam setiap event kegiatan
4. Tingkat pendidikan yang meningkat diwilayah Kabupaten Bandung
5. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam memenui undangan kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029

Penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Bandung menunjukan intensitas pelaksanaan tugas di masa

yang datang akan semakin meningkat, hal ini dilihat dari kondisi tantangan zaman yang menuntut kemampuan menganalisa situasi yang terjadi dan dituntut untuk menguasai di bidang teknologi. Dilihat dari perkembangannya, perencanaan pada Bakesbangpol Kabupaten Bandung perlu ditingkatkan dan diperbarui agar selaras dengan kondisi yang ada serta mampu menyesuaikan diri dengan dinamika dan tuntutan perubahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Berbagai tantangan yang memengaruhi kinerja layanan Bakesbangpol Kabupaten Bandung menjadi landasan penting dalam penetapan isu strategis di Bakesbangpol. Adapun tantangan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Masuknya arus globalisasi dan informasi yang semakin cepat, yang dapat memengaruhi cara pandang masyarakat dan berpotensi melemahkan semangat persatuan apabila tidak diimbangi dengan pembinaan wawasan kebangsaan.
2. Perkembangan teknologi dan pola pelayanan publik yang semakin modern, yang menuntut Bakesbangpol untuk bekerja lebih terbuka, cepat, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Mudahnya akses terhadap berbagai informasi di ruang digital, yang apabila tidak disertai pemahaman yang cukup dapat menimbulkan kesalahpahaman, provokasi, dan konflik di tengah masyarakat.
4. Perubahan kondisi sosial yang semakin beragam dan dinamis, yang dapat menumbuhkan kecenderungan membela kelompok atau kepentingan tertentu sehingga berpotensi mengganggu kerukunan dan kebersamaan.
5. Perlunya pembinaan dan penguatan peran organisasi kemasyarakatan secara berkelanjutan, agar kegiatan ormas tetap terkendali dan mendukung arah pembangunan daerah.

2.2.2 Review Renstra K/L dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Berkaitan dengan upaya mempercepat terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Bandung, maka dapat diidentifikasi faktor faktor peluang dan tantangan pelayanan Bakesbangpol yang relevan dan berpengaruh langsung. Pelibatan masyarakat juga menjadi elemen penting dalam strategi Bakesbangpol. Jumlah partisipan dari kalangan tokoh agama, pemuda, dan perempuan yang dilibatkan dalam program penguatan nilai kebangsaan menjadi indikator bahwa pendekatan partisipatif terus dikembangkan. Ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif dalam menghadapi isu-isu strategis

seperti intoleransi, radikalisme, serta disintegrasi bangsa. Meskipun terdapat berbagai capaian positif, masih terdapat tantangan yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah perlunya penguatan koordinasi lintas sektor dalam menangani konflik sosial serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal pemantauan dan analisis situasi sosial-politik. Digitalisasi sistem pemantauan dan pelaporan juga menjadi kebutuhan mendesak agar Bakesbangpol mampu bekerja secara lebih efisien dan adaptif terhadap dinamika yang cepat berubah.

2.2.3 Penelahaan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 menjadi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib ditelaah oleh setiap perangkat daerah, termasuk Bakesbangpol, agar program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra selaras dengan arah pembangunan daerah. Dari hasil penelaahan, terdapat keterkaitan langsung antara misi pembangunan daerah dengan peran Bakesbangpol, terutama pada aspek penguatan tata kelola pemerintahan yang demokratis, peningkatan stabilitas politik dan keamanan, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat. Bakesbangpol berkontribusi langsung dalam membentuk sumber daya manusia yang berkarakter melalui penguatan wawasan kebangsaan, menjaga iklim demokrasi daerah yang sehat melalui fasilitasi partai politik dan pendidikan politik masyarakat, serta memelihara stabilitas politik dan ketertiban umum melalui fungsi deteksi dini dan pencegahan konflik sosial.

Secara substansi, sasaran pembangunan dalam RPJMD yang relevan dengan tugas Bakesbangpol meliputi: peningkatan wawasan kebangsaan dan pengamalan nilai ideologi Pancasila, fasilitasi kehidupan demokrasi dan partisipasi politik masyarakat, pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, pemeliharaan kerukunan antar umat beragama, peningkatan deteksi dini dan penanganan potensi konflik sosial, serta penguatan koordinasi dengan Forkopimda dan instansi vertikal dalam rangka menjaga stabilitas daerah. Dengan demikian, penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029 menjadi pijakan strategis bagi Bakesbangpol untuk menyusun tujuan, sasaran, indikator, dan program prioritas dalam Renstra, sehingga peran Bakesbangpol dapat secara nyata mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan Kabupaten Bandung. Dengan demikian, Bakesbangpol berperan strategis dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Bandung yang lebih “Bedas” melalui penguatan ideologi, peningkatan kualitas demokrasi, serta pemeliharaan kerukunan dan ketenteraman masyarakat.

2.2.4 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung merupakan dokumen perencanaan yang mengatur struktur ruang dan pola ruang wilayah sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang untuk pembangunan daerah. Penelaahan RTRW diperlukan agar arah kebijakan dan program perangkat daerah, termasuk Bakesbangpol dapat diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Bagi Bakesbangpol, meskipun tidak secara langsung berhubungan dengan aspek teknis penataan ruang, RTRW memiliki keterkaitan erat dalam menciptakan stabilitas sosial, politik, dan keamanan yang menjadi prasyarat bagi keberhasilan implementasi tata ruang. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya seringkali menimbulkan potensi konflik sosial, baik terkait lahan, perbatasan wilayah, penggunaan kawasan permukiman, hingga pengelolaan kawasan strategis. Oleh karena itu, Bakesbangpol berperan dalam melakukan deteksi dini dan fasilitasi penyelesaian potensi konflik yang muncul akibat permasalahan tata ruang, sekaligus memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah teknis serta unsur Forkopimda.

Dengan demikian, penelaahan RTRW Kabupaten Bandung menjadi landasan bagi Bakesbangpol dalam menempatkan peran strategisnya sebagai fasilitator pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, menjaga harmoni sosial di wilayah yang berpotensi rawan konflik ruang, serta mendukung terciptanya iklim sosial politik yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan sesuai rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Dalam penelaahan RTRW Kabupaten Bandung, terdapat sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan peran Bakesbangpol. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan, seperti alih fungsi lahan pertanian atau kawasan konservasi, berpotensi memicu konflik sosial antar kelompok masyarakat maupun dengan pemerintah. Pembangunan infrastruktur skala besar juga sering menimbulkan gejolak akibat pembebasan lahan, sementara kawasan strategis seperti industri, pariwisata, dan perkotaan menghadapi tekanan sosial dari urbanisasi dan migrasi. Bakesbangpol memiliki peran penting dalam deteksi dini, fasilitasi dialog, dan menjaga harmoni sosial agar pelaksanaan RTRW dapat berjalan kondusif tanpa mengganggu stabilitas politik dan keamanan daerah.

2.2.5 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sesuai dengan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah telah memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dari hasil analisis terhadap dokumen KLHS Kabupaten Bandung, tidak terdapat keterkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol yang lebih berfokus pada urusan ideologi, politik, organisasi kemasyarakatan, kewaspadaan dini, serta ketenteraman dan ketertiban umum.

Namun demikian, secara tidak langsung KLHS tetap relevan bagi Bakesbangpol dalam konteks pemeliharaan stabilitas sosial dan politik. Pemanfaatan ruang dan pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat memicu kerawanan sosial, konflik lahan, maupun penolakan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, peran Bakesbangpol terletak pada upaya deteksi dini, fasilitasi komunikasi, dan pencegahan konflik yang berpotensi muncul akibat implementasi program pembangunan berbasis KLHS. Dengan demikian, meskipun kontribusi Bakesbangpol terhadap KLHS bersifat tidak langsung, dukungan pada terciptanya kondisi sosial-politik yang kondusif tetap menjadi bagian penting dalam menjamin keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Bandung.

2.2.6 Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bandung ke depan diperkirakan akan semakin meningkat. Hal ini seiring dengan tantangan perkembangan zaman yang menuntut kemampuan dalam menganalisis situasi serta penguasaan teknologi sebagai bagian penting dalam mendukung pelayanan publik yang efektif. Untuk itu, Bakesbangpol Kabupaten Bandung perlu terus menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan programnya agar sejalan dengan kondisi dan kebutuhan yang terus berkembang. Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang lebih baik, diperlukan pemahaman terhadap berbagai faktor yang memengaruhi kinerja organisasi, baik dari dalam maupun dari luar. Melalui analisis terhadap kondisi tersebut, Bakesbangpol diharapkan dapat menentukan arah kebijakan dan strategi pelayanan yang tepat guna menjaga stabilitas politik, memperkuat persatuan dan kesatuan

bangsa, serta mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis.

Adapun tantangan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan dinamika sosial, politik, dan teknologi yang cepat menuntut aparatur Bakesbangpol memiliki kemampuan analisis situasi, adaptasi, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik yang efektif.
2. Meningkatnya potensi konflik sosial, radikalisme, dan intoleransi akibat perbedaan pandangan politik, sosial, dan agama masih menjadi ancaman bagi stabilitas daerah.
3. Rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai Pancasila serta wawasan kebangsaan di sebagian masyarakat menyebabkan menurunnya semangat bela negara dan persatuan bangsa.
4. Masih lemahnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan demokrasi berdampak pada rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan publik terhadap proses pemerintahan.
5. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran menghambat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Bakesbangpol secara menyeluruh.
6. Ancaman penyalahgunaan narkotika serta lemahnya regulasi dan kerukunan umat beragama masih memerlukan perhatian dalam menjaga ketahanan sosial, budaya, dan moral masyarakat.
7. Masih terbatasnya koordinasi dan integrasi antarperangkat daerah dalam menangani isu ideologi, politik, dan kebangsaan menyebabkan efektivitas kebijakan belum optimal.

Dari tantangan diatas, ada peluang yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas Bakesbangpol Kabupaten Bandung.

1. Kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penyebaran informasi, memperluas jangkauan sosialisasi nilai kebangsaan, dan meningkatkan koordinasi lintas sektor.
2. Tersedianya kebijakan nasional serta kerja sama dengan aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan menjadi dasar untuk memperkuat upaya deteksi dini dan pencegahan konflik.
3. Tersedianya jejaring kerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pendidikan ideologi dan karakter kebangsaan.

4. Memanfaatkan momen demokrasi dan penyelenggaraan pemilu yang transparan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pendidikan politik dan partisipasi masyarakat.
5. Adanya upaya perbaikan birokrasi dan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan aparatur menjadi peluang bagi Bakesbangpol untuk memperbaiki kinerja dan profesionalitas lembaganya.
6. Dukungan lintas sektor dan forum kerukunan umat beragama menjadi modal sosial yang penting untuk memperkuat ketahanan daerah terhadap ancaman tersebut.
7. Penguatan kolaborasi lintas sektor serta penerapan sistem pelayanan berbasis digital dapat meningkatkan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program Bakesbangpol.

Maka permasalahan pokok secara internal yang belum optimal dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut :

1. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung masih terbatas, sehingga pelaksanaannya belum dapat berjalan secara optimal
2. Jumlah dan kompetensi aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi belum memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas serta pemanfaatan teknologi informasi belum maksimal.
3. Sebagian kegiatan belum memiliki SOP , yang berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan antarbidang yang belum bisa terukur dan kurang konsisten.
4. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan data dan pelaporan secara digital, yang menghambat efektivitas koordinasi internal dan penyediaan informasi yang akurat serta tepat waktu.
5. Koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan belum optimal, sehingga penanganan dinamika sosial politik dan potensi konflik di daerah masih belum berbasis pencegahan.

Dalam rangka penyusunan rencana strategis, diperlukan identifikasi terhadap berbagai permasalahan pokok yang dihadapi oleh Bakesbangpol Kabupaten Bandung. Permasalahan tersebut mencakup isu-isu strategis pada bidang politik dalam negeri, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama, serta penanganan konflik sosial dan ancaman terorisme. Masing-masing permasalahan memiliki akar penyebab yang beragam, baik yang bersumber dari dinamika sosial, politik, budaya, ekonomi, maupun pengaruh eksternal. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan masalah secara sistematis sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut untuk menjadi dasar perumusan

arah kebijakan dan strategi ke depan. Berikut disampaikan tabel pohon masalah yang terdapat pada Bakesbangpol :

Tabel 2. 9 Pohon Masalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah/Penyebab
Belum optimalnya penanganan konflik sosial di Wilayah Kabupaten Bandung	Konflik sosial yang belum tertangani secara optimal	- Adanya perubahan struktur sosial, nilai budaya, norma yang memengaruhi cara berinteraksi masyarakat
		- Terjadinya ketidakstabilan politik, korupsi, kegagalan pemerintah dalam mengatasi masalah
		- Munculnya pengaruh pertukaran informasi yang membawa ideologi luar
		- Ancaman penyebaran informasi cepat/luas yang memengaruhi ideologi masyarakat
		- Adanya konflik berbasis agama/etnis
		- Adanya kelompok ekstremis/ militan dengan pandangan radikal dan ekstrem
Belum optimalnya Rencana Aksi Daerah Penanganan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, terutama dalam hal deradikalisasi dan upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi para mantan napi teroris dan kombatan	Ancaman terorisme, radikalisme, dan reintegrasi mantan napi teroris	- Kurangnya rencana aksi terfokus pada pemulihan sosial ekonomi eks napi teroris/kombatan
		- Belum ada sinkronisasi program dengan perangkat daerah lain (ekonomi, ketenagakerjaan, UMKM, bantuan sosial)
Belum optimalnya pengarusutamaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Implementasinya sebagai bentuk Bela Negara kepada masyarakat	Pemahaman dan pengamalan Pancasila serta wawasan kebangsaan masih rendah	- Belum ada standar baku penilaian pemahaman masyarakat tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan
		- Muncul pengaruh ideologi lain akibat perkembangan teknologi
		- Kurangnya peran keluarga/lembaga pendidikan dalam menanamkan nilai Pancasila
		- Adanya penyimpangan penerapan nilai Pancasila
		- Rendahnya kesadaran individu untuk memahami/mengamalkan Pancasila
		- Kurikulum pendidikan kurang menekankan nilai-nilai Pancasila
Belum optimalnya fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	Ancaman narkotika, lemahnya regulasi, dan kerukunan umat beragama	- Belum ada BNN tingkat Kabupaten Bandung
		- Penyebaran/penyalahgunaan narkotika semakin masif/bervariasi
		- Regulasi belum membatasi gejolak pembangunan rumah ibadah
		- Belum maksimalnya forum-forum kerukunan umat beragama dan pembauran kebangsaan
		- Minimnya literasi masyarakat terhadap ancaman akibat perubahan zaman dan teknologi
Belum optimalnya fasilitasi kehidupan politik dalam negeri (Poldagri) di Kabupaten Bandung	Dinamika politik lokal yang belum stabil	- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses politik dan demokrasi
		- Masih lemahnya kaderisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat maupun partai politik

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah/Penyebab
		- Adanya potensi konflik dalam penyelenggaraan pemilu/pilkada akibat perbedaan pilihan politik
		- Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
		- Minimnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam perumusan kebijakan

Sumber : Hasil Analisis Bakesbangpol, 2025

2.2.7 Isu Strategis

Secara eksternal, periode 2025–2029 beririsan dengan momentum politik nasional dan daerah, seperti Pemilu, Pilpres, dan Pilkada, yang menjadi tahun politik bagi Kabupaten Bandung. Kondisi ini berpotensi memengaruhi dinamika sosial masyarakat dan menuntut peran aktif Bakesbangpol dalam menjaga stabilitas, meningkatkan kesadaran politik yang sehat, serta mencegah potensi konflik. Memasuki tahapan Pemilu, Pilkada, dan Pilpres di Kabupaten Bandung, intensitas aktivitas politik mengalami peningkatan signifikan. Kondisi ini mendorong naiknya suhu perpolitikan di masyarakat, yang secara langsung memengaruhi dinamika sosial di daerah. Peningkatan dinamika politik tersebut menimbulkan potensi konflik, baik yang berkaitan dengan perbedaan pilihan politik, ketegangan antarkelompok, maupun gesekan berbasis identitas sosial dan etnis.

Apabila tidak diantisipasi secara tepat, situasi tersebut dapat berdampak pada terganggunya rasa aman dan stabilitas sosial masyarakat. Dalam konteks ini, kebutuhan akan penguatan persatuan dan kesatuan menjadi semakin penting agar potensi disintegrasi dapat dicegah sejak dini. Akibatnya, target kinerja yang telah ditetapkan berisiko tidak tercapai secara optimal, karena energi kelembagaan lebih banyak tersita untuk merespons situasi yang bersifat reaktif dibanding fokus pada pencapaian tujuan strategis.Sedangkan secara internalnya bahwa kuantitas dan kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal teknologi untuk menuju era digitalisasi.

Untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Bandung, dilakukan analisis terhadap potensi, permasalahan, serta dinamika lingkungan strategis pada tingkat global, nasional, dan regional. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam perumusan isu strategis yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan, sebagai berikut :

Tabel 2. 10 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS Yang Relevan Dengan PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Keberagaman agama dan etnis yang tinggi berpotensi memunculkan gesekan sosial jika tidak difasilitasi secara tepat.	Belum optimalnya penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Bandung	Penguatan harmoni sosial dan pencegahan konflik horizontal untuk menjaga stabilitas sosial masyarakat.	Penguatan ketahanan sosial serta peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat	Perubahan dinamika sosial masyarakat perkotaan dan meningkatnya mobilitas penduduk yang dapat memicu kesenjangan sosial	Perlunya penguatan kualitas SDM dan kelembagaan dalma menjaga stabilitas sosial dan kerukunan antarwarga	Peningkatan peran fasilitasi pemerintah daerah dalam menjaga toleransi, mencegah konflik identitas, dan memperkuat kohesi sosial masyarakat.
Kebutuhan peningkatan fasilitasi ruang dialog publik dan sistem komunikasi sosial untuk menjaga stabilitas daerah.	Belum optimalnya rencana aksi daerah penanganan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, terutama dalam hal deradikalisasi dan upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi para mantan napi teroris dan kombatan	Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang memperkuat ketahanansosial, serta penguatan kapasitas daerah dalam pencegahan konflik.	Percepatan digitalisasi global menuntut kecepatan akses informasi dan komunikasi publik.	Rendahnya penggunaan teknologi tinggi dalam industri yang membuat nilai tambah industri masih rendah	Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar	Peningkatan kapasitas masyrakat, Lembaga, serta pemberdayaan ekonomi kelompok rentan agar tercipta kehidupan yang aman dana damai.
Penguatan kapasitas sumber daya manusia strategis untuk mendukung fungsi deteksi dini dan pembinaan ideologi.	Belum optimalnya pengarusutamaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Implementasinya sebagai bentuk Bela Negara kepada masyarakat	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan nilai-nilai kebangsaan, ideologi Pancasila, serta literasi sosial dan politik masyarakat.	Tuntutan kompetensi global dalam analisis sosial politik dan literasi digital.	Tingkat kemiskinan rata-rata Jawa masih cenderung tinggi	Peningkatan Pendidikan kebangsaan dan karakter bagi masyarakat di tingkat daerah untuk memperkuat jati diri bangsa	Peningkatan kualitas dan cakupan pembinaan ideologi Pancasila serta penguatan karakter kebangsaan masyarakat melalui kolaborasi antarinstansi dan dukungan infrastruktur Pendidikan ideologi
Kesempatan membangun sistem layanan kewaspadaan dini dan pembinaan politik yang lebih terstruktur dan terstandar.	Belum optimalnya fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	Perlu adanya tata kelola pelayanan politik dan sosial yang sistematis untuk mendukung stabilitas dan integrasi sosial.	Standarisasi tata kelola pemerintahan menjadi tren global untuk menciptakan birokrasi yang adaptif dan responsif.	Pemerintah pusat mendorong peningkatan tata kelola kelembagaan sosial dan politik yang adaptif terhadap perubahan sosial	Penyesuaian tata kelola daerah agar lebih sistematis dan akuntabel dalam menyikapi dinamika sosial politik wilayah.	Penguatan koordinasi dan sinergi kelembagaan sosial, budaya, politik dan keagamaan dalam rangka memperkuat nilai toleransi, serta mendukung pembangunan daerah yang harmonis.
Pengembangan digitalisasi sistem informasi politik dan deteksi dini sebagai peluang peningkatan efektivitas layanan.	Belum optimalnya fasilitasi kehidupan politik dalam negeri (Poldagri) di Kabupaten Bandung	Kebutuhan sistem informasi dan komunikasi publik yang transparan, cepat, dan responsive dalam mendukung penyelenggraan pemerintahan dan kewaspadaan sosial politik.	Perubahan sistem informasi global menuju digital intelligence dan respons cepat.	Agenda nasional digitalisasi data dan system informasi pemerintahan untuk mendukung tata Kelola yang terbuka	Penguatan sistem informasi yang cepat, terintegrasi, dan mendukung kewaspadaan sosial politik di tingkat daerah	Pengembangan sistem digital kewaspadaan dini dan pelaporan sosial politik yang cepat dan terintegrasi.

Sumber : Hasil Analisis Bakesbangpol, 2025

Berdasarkan hasil analisis isu strategis, permasalahan utama yang dihadapi Bakesbangpol Kabupaten Bandung mencakup masih lemahnya sistem deteksi dini dan penanganan potensi konflik sosial, rendahnya kualitas literasi politik dan kesadaran ideologis masyarakat, serta belum

optimalnya tata kelola layanan urusan kesatuan bangsa dan politik yang adaptif terhadap dinamika sosial politik yang terus berkembang. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan infrastruktur komunikasi publik, keterhubungan sistem informasi yang belum terintegrasi, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam merespons isu sosial politik secara cepat, tepat, dan preventif. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kerentanan sosial akibat rendahnya toleransi dan kurang optimalnya mekanisme regulasi serta mediasi di tingkat daerah. Permasalahan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi diperkuat oleh keterbatasan fasilitas ruang, perangkat teknologi, serta media komunikasi yang menyebabkan pelayanan di bidang ideologi, politik, organisasi kemasyarakatan, dan kewaspadaan nasional belum berjalan optimal. Selain itu, jumlah dan kompetensi pegawai yang masih rendah turut menghambat efektivitas pelaksanaan deteksi dini potensi konflik, fasilitasi organisasi masyarakat, serta pembinaan wawasan kebangsaan.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah ketiadaan standar operasional prosedur pada beberapa kegiatan strategis yang mengakibatkan pelayanan belum seragam dan kinerja sulit diukur secara jelas. Di samping itu, sistem pelaporan yang masih manual menghambat penyediaan data cepat dan akurat, padahal ketersediaan data sangat penting untuk mendukung kebijakan berbasis bukti dan integrasi perencanaan pembangunan. Lebih jauh, arus informasi yang tidak terbendung, ditambah rendahnya kemampuan literasi politik dan digital masyarakat, terutama di wilayah perbatasan, menimbulkan kerentanan terhadap hoaks, isu provokatif, serta konflik bernuansa kedaerahan.

Jika dikaitkan dengan isu lingkungan dinamis, maka dalam konteks global permasalahan ini berhubungan dengan meningkatnya arus informasi lintas negara yang dapat memengaruhi stabilitas politik dan keamanan daerah. Pada tingkat nasional, hal ini terkait dengan rendahnya literasi politik masyarakat, keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem deteksi dini, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, pada tingkat regional, kompleksitas dinamika sosial budaya di Jawa Barat, kesenjangan kapasitas SDM antarwilayah, serta keterbatasan infrastruktur pelayanan publik menjadi faktor yang memperbesar potensi konflik sosial.

Di sisi lain, kemampuan aparatur dalam mengelola informasi dan melakukan deteksi dini potensi konflik masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menghadapi arus informasi yang begitu cepat

berkembang. Kondisi ini semakin terasa karena belum semua kegiatan strategis memiliki pedoman kerja yang jelas, sehingga pelaksanaan layanan sering tidak seragam dan sulit dievaluasi secara obyektif. Sistem pelaporan yang masih manual juga menghambat penyediaan data yang cepat dan akurat, padahal data sangat dibutuhkan untuk mendukung kebijakan yang tepat dan responsif.

Jika dikaitkan dengan dinamika sosial politik tahun 2025–2029 yang bertepatan dengan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak, maka kesiapan Bakesbangpol menjadi semakin penting. Situasi politik yang menghangat berpotensi memicu ketegangan di masyarakat jika tidak diantisipasi. Oleh karena itu, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas aparatur, digitalisasi sistem layanan dan deteksi dini, serta pembinaan partisipasi masyarakat menjadi langkah strategis agar stabilitas sosial dan politik di Kabupaten Bandung tetap terjaga.

Penentuan Isu-isu strategis Pada umumnya kualitas penanganan permasalahan dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Bandung sangat kompleks. Hal ini terlihat dari situasi dan kondisi wilayah dan keberagamannya, dilihat dari secara eksternal . sedangkan dari sudut internal dikaitkan dengan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Kabupaten Bandung dilakukanh secara telaahan terhadap gambaran umum pelayanan, pencapaian target Renstra dan dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Bakesbangpol Kabupaten Bandung diperoleh isu-isu strategis yang mana apabila Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Bakesbangpol di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.Yang diuraikan dibawah ini :

1. Belum optimalnya sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi konflik sosial, politik, dan keamanan di wilayah Kabupaten Bandung.
2. Rendahnya literasi politik, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ideologi masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki potensi kerawanan sosial.

3. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan serta partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan persatuan daerah.
4. Terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan urusan kesatuan bangsa dan politik, termasuk sistem pelaporan dan basis data sosial politik daerah.
5. Kapasitas dan kompetensi SDM Bakesbangpol masih perlu ditingkatkan agar mampu merespons dinamika sosial politik secara cepat, akurat, dan profesional.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

3.1.1 Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung

Tujuan dalam RPJMD adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang dirumuskan melalui penelaahan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bandung 2025-2029, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional maupun Provinsi Jawa Barat dan isu – isu strategis pembangunan Kabupaten Bandung. Selanjutnya tujuan yang dirumuskan ini, akan dikolaborasikan dengan visi misi Kepala Daerah terpilih untuk menghasilkan rumusan tujuan pembangunan Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2030.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Bakesbangpol Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 dilengkapi dengan IKU Bakesbangpol sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Bakesbangpol dalam bidang kesatuan bangsa dan politik. Arah kebijakan tersebut difokuskan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM**.** Dengan landasan ini, seluruh strategi, program, dan kegiatan diarahkan untuk membangun masyarakat yang sadar akan pentingnya persatuan, toleransi, dan stabilitas sosial politik di Kabupaten Bandung.

Dengan demikian, pembangunan lima tahun ke depan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan jangka menengah Bakesbangpol Kabupaten Bandung ditempuh dengan menelaah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Adapun tujuan jangka menengah Bakesbangpol Provinsi adalah: “Meningkatnya stabilitas kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM”

Dalam wujud tata kelola pemerintahan yang baik dan dinamis maka perlu didorongnya beberapa faktor tersebut yaitu meningkatnya kualitas melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan dan penyelenggaran pelayanan publik dan meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah. Selain itu dalam mewujudkan tata

kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, pemerintah daerah perlu menciptakan stabilitas lingkunagan bermasyarakat yang religius dan kondusif dengan cara meningkatkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

3.1.2 Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil *(outcome)* dari pelaksanaan program Bakesbangpol Kabupaten Bandung. Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran tersebut menjadi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar tetap selaras dengan arah pembangunan daerah.

Sasaran yang ingin diwujudkan Bakesbangpol adalah "Meningkatnya kesadaran kolektif serta peran aktif masyarakat dalam membangun kehidupan sosial yang berlandaskan Pancasila, prinsip demokrasi, dan penghormatan terhadap HAM." Sasaran ini menjadi dasar dalam penyusunan strategi, program, dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan persatuan, toleransi, dan ketahanan sosial politik masyarakat Kabupaten Bandung.

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Bakesbangpol

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya stabilitas kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM	Meningkatnya pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM		Persentase Potensi Konflik Sosial yang Diselesaikans	80%	82%	84%	86%	88%	89%	1.aspek penegakan perda 2. aspek pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 3. aspek pemeliharaan perlindungan masyarakat 4. aspek sumber daya manusia "
			Presentase Msyarakat Yang Menerapkan Hasil Pembinaan Kebebasn, Kesetaraan dan Kapasitas Lembaga Demokrasi	31.25 %	33.33 %	38.33%	41.67 %	42.86 %	45.71%	
		Meningkatnya kesadaran kolektif serta peran aktif masyarakat dalam kewaspadaan terhadap konflik sosial	Persentase Potensi Konflik Sosial yang Diselesaikans	80%	82%	84%	86%	88%	89%	Jumlah Laporan Konflik yang diselesaikan/Jumlah konflik yang dilaporkan X 100%

		Meningkatnya pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun kehidupan sosial yang berlandaskan Pancasila dan prinsip demokrasi	Persentase Masyarakat yang Menerapkan Hasil Pembinaan Kebebasan, Kesetaraan dan Kapasitas Lembaga Demokrasi	31.25 %	33.33 %	38.33%	41.67 %	42.86 %	45.71%	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dibina/Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang Melakukan Kegiatan dalam rangka Kebebasan berpendapat X 100%

Sumber : Hasil Evaluasi Bakesbangpol, 2025

Berdasarkan tabel teknik perumusan tujuan dan sasaran Renstra Bakesbangpol Kabupaten Bandung, arah kebijakan difokuskan pada peningkatan stabilitas kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Untuk mencapai tujuan tersebut, Bakesbangpol menetapkan dua sasaran utama. Pertama, meningkatnya pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM**,** dengan indikator kinerja berupa Persentase Potensi Konflik Sosial yang Diselesaikan *serta* Persentase Masyarakat yang Menerapkan Hasil Pembinaan Kebebasan, Kesetaraan dan Kapasitas Lembaga Demokrasi. Target capaian indikator ini menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu dari 80% pada tahun 2025 menjadi 89% pada tahun 2030 untuk penyelesaian potensi konflik sosial, serta dari 31,25% pada tahun 2025 menjadi 45,71% pada tahun 2030 untuk penerapan hasil pembinaan masyarakat. Peningkatan ini menunjukkan komitmen Bakesbangpol dalam memperkuat peran masyarakat sebagai subjek pembangunan politik yang berkeadaban dan toleran. Peningkatan ini mencerminkan penguatan kualitas pembinaan ideologi dan demokrasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Kedua, meningkatnya kesadaran kolektif dan peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik sosial, yang diukur melalui indikator yang sama guna menjaga konsistensi pengukuran kinerja perangkat daerah. Penguatan kesadaran ini dilakukan melalui pembinaan organisasi kemasyarakatan, fasilitasi dialog sosial politik, serta edukasi kebangsaan yang berkelanjutan.

Secara umum, tabel ini menunjukkan bahwa Bakesbangpol berfokus pada dua aspek penting yaitu pencegahan konflik sosial dan pembinaan kehidupan demokratis. Keduanya merupakan elemen penting dalam menciptakan lingkungan sosial-politik yang stabil dan kondusif. Dengan target yang meningkat secara bertahap, dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategis Bakesbangpol tidak hanya bersifat reaktif terhadap dinamika sosial, tetapi juga bersifat proaktif dan terstruktur untuk jangka menengah. Indikator-indikator ini juga memperlihatkan

adanya integrasi yang kuat antara arah kebijakan RPJMD dan sasaran teknis perangkat daerah.

3.2 Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Bakesbangpol Tahun 2025-2029

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap 1 (2026)	Tahap II(2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Peningkatan kesadaran dan pendidikan politik masyarakat, pembangunan ruang partispasi aktif, penguatan pengawasan kontrol sosial, peningkatan transparansi lembaga dan kolaborasi multi pihak	Peningkatan kesadaran dan pendidikan politik masyarakat, pembangunan ruang partispasi aktif, penguatan pengawasan kontrol sosial, peningkatan transparansi lembaga dan kolaborasi multi pihak	Peningkatan kesadaran dan pendidikan politik masyarakat, pembangunan ruang partispasi aktif, penguatan pengawasan kontrol sosial, peningkatan transparansi lembaga dan kolaborasi multi pihak	Peningkatan kesadaran dan pendidikan politik masyarakat, pembangunan ruang partispasi aktif, penguatan pengawasan kontrol sosial, peningkatan transparansi lembaga dan kolaborasi multi pihak	Penguatan peran masyarakat dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat dan peningkatan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi

Sumber : Hasil Analisis Bakesbangpol, 2024

Berdasarkan Tabel 3.2, penahapan Renstra Bakesbangpol menggambarkan sebuah arah pembangunan yang sistematis dalam rangka memperkuat demokrasi dan partisipasi masyarakat. Fokus awal dimulai dari peningkatan kesadaran dan pendidikan politik masyarakat yang menjadi landasan penting untuk membangun pemahaman yang lebih baik terhadap hak, kewajiban, serta nilai-nilai demokrasi. Pendidikan politik ini diposisikan sebagai instrumen strategis agar masyarakat mampu berperan aktif dalam ruang publik, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama.

Selanjutnya, penahapan ini menekankan pembangunan ruang partisipasi aktif yang lebih luas, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang berdaya dalam mengawasi, mengkritisi, dan memberi masukan terhadap jalannya pemerintahan. Peran pengawasan sosial diperkuat sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi lembaga-lembaga demokrasi. Hal ini menunjukkan adanya perhatian pada aspek tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, strategi yang dirumuskan juga mendorong peningkatan transparansi dalam lembaga-lembaga publik dan membuka peluang kolaborasi multi pihak. Kolaborasi ini penting karena menjaga stabilitas

sosial dan politik tidak bisa hanya ditopang oleh pemerintah, tetapi juga memerlukan peran serta aktif masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, akademisi, maupun sektor swasta. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan terbangun jaringan yang kuat untuk memperkuat nilai demokrasi dan mengurangi potensi konflik sosial.

Secara umum, keseluruhan tahapan ini diarahkan pada penguatan peran masyarakat dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Demokrasi yang dimaksud bukan hanya dalam tataran formal seperti partisipasi dalam pemilu, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari melalui kebebasan berpendapat, kesetaraan dalam berorganisasi, dan keterlibatan aktif dalam membangun kapasitas lembaga demokrasi. Dengan demikian, Renstra Bakesbangpol memiliki kontribusi langsung dalam mendukung sasaran RPJMD, yakni membangun kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan penghormatan terhadap HAM.

3.3 Penyajian Lokus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 3. 3 Penyajian Lokus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program	Pagu Indikatif					Lokus
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,322,668,650	10,912,057,000	10,912,057,000	10,912,057,000	10,912,057,000	Kabupaten Bandung
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000	Kabupaten Bandung
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	13,677,638,400.00	3,041,994,400.00	3,041,994,400.00	3,041,994,400.00	3,041,994,400.00	Kabupaten Bandung
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	3,217,181,600.00	2,372,181,600.00	2,372,181,600.00	2,372,181,600.00	2,372,181,600.00	Kabupaten Bandung
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	Kabupaten Bandung
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	16,060,353,163.00	4,908,235,000.00	4,908,235,000.00	4,908,235,000.00	4,908,235,000.00	Kabupaten Bandung

Sumber : Hasil Evaluasi Bakesbangpol, 2025

Berdasarkan Tabel 3.3 mengenai penyajian lokus Bakesbangpol alokasi pagu indikatif untuk periode 2026–2030 menunjukkan distribusi anggaran pada enam program utama. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan alokasi yang relatif stabil, yaitu sebesar Rp10,32 miliar pada 2026 dan meningkat menjadi Rp10,91 miliar mulai tahun 2027 hingga 2030. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan memperoleh anggaran tetap sebesar Rp1,25 miliar setiap tahunnya. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik mengalami penurunan signifikan dari Rp13,67 miliar pada 2026 menjadi Rp3,04 miliar pada 2027, dan jumlah tersebut dipertahankan hingga 2030.

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan juga mengalami penurunan dari Rp3,21 miliar pada 2026 menjadi Rp2,37 miliar pada 2027, kemudian tetap pada angka tersebut hingga 2030. Sementara itu, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya mendapatkan anggaran paling kecil dan tetap, yaitu Rp150 juta per tahun. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial memperoleh alokasi terbesar, yakni Rp16,06 miliar pada 2026, namun turun menjadi Rp4,90 miliar mulai 2027 hingga 2030. Secara keseluruhan, pola alokasi anggaran menunjukkan adanya prioritas yang cukup besar pada program penunjang pemerintahan daerah serta penanganan konflik sosial di awal periode, diikuti dengan konsistensi pembiayaan pada program-program strategis lainnya. Anggaran yang dialokasikan dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah, mengingat fokusnya pada peningkatan stabilitas pemerintahan, penguatan ideologi kebangsaan, pembinaan politik, serta penguatan ketahanan sosial dan budaya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

3.4 Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tabel 3. 4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
	Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Penguatan peran masyarakat dan peningkatan komitmen multi pihak dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat dan peningkatan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Menciptakan masyarakat yang disiplin dan harmonis	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
	Meningkatnya stabilitas kehidupan bermasyarakat berbasis partisipatif		Pembinaan kesadaran keamanan untuk masyarakat pada skala lingkungan	

Sumber : Hasil Analisis Bakesbangpol, 2025

Dari Tabel 3.4 tentang teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Bakesbangpol, terlihat bahwa tiap program memiliki turunan arah kebijakan yang dirancang secara bertahap dan saling mendukung. Fokus utama kebijakan ini adalah menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta berdemokrasi. Analisis terhadap tabel ini menyoroti keterkaitan antara operasionalisasi NSPK, RPJMD, dan bagaimana hal tersebut diturunkan menjadi kebijakan strategis di tingkat pelaksana teknis perangkat daerah.

Pada tataran operasionalisasi NSPK, fokus utama adalah peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat melalui penguatan peran serta partisipasi masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui pembinaan kesadaran, fasilitasi forum demokrasi lokal, serta penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat. Arah kebijakan RPJMD berupa penguatan kerukunan antaretnis, agama, dan golongan kemudian diarahkan dalam Renstra Bakesbangpol menjadi kebijakan untuk menciptakan masyarakat yang disiplin dan harmonis. Hal ini menjadi dasar penting karena stabilitas sosial sangat bergantung pada kerukunan di tengah keberagaman. Dengan demikian, arah kebijakan Renstra memperlihatkan prioritas pada pencegahan konflik melalui harmonisasi hubungan antarwarga dan fasilitasi regulasi mediasi sosial.

Sementara itu, untuk NSPK meningkatnya stabilitas kehidupan bermasyarakat berbasis partisipatif, arah kebijakan RPJMD difokuskan pada penguatan sistem pengaduan masyarakat berbasis digital. Dalam Renstra, kebijakan ini diarahkan untuk membina kesadaran keamanan di tingkat lingkungan. Artinya, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan tetapi juga dilibatkan secara langsung dalam menciptakan rasa aman di lingkungannya sendiri. Bakesbangpol dalam hal ini tidak hanya memperluas saluran pelaporan digital, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat agar mampu secara mandiri melakukan deteksi dini dan menjaga stabilitas sosial politik wilayah. Pendekatan ini memperlihatkan perpaduan antara pemanfaatan teknologi dengan partisipasi sosial masyarakat.

Selain itu, terdapat arah kebijakan yang menekankan pentingnya pendidikan dan sosialisasi tentang bahaya konflik, radikalisme, serta

penyebaran paham intoleransi. Hal ini diarahkan agar Bakesbangpol mengambil peran pencegahan dalam menjaga keamanan non-fisik melalui strategi edukatif, penyadaran publik, serta pembangunan narasi tandingan terhadap paham radikal. Implementasinya dapat berupa kebijakan komunikasi publik, pelatihan tokoh masyarakat, dan penguatan forum-forum demokrasi lokal. Dengan demikian, peran Bakesbangpol semakin diarahkan untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman ideologis dan sosial yang bersifat memecah belah.

Penguatan komitmen berbagai pihak dalam membangun integritas dan persatuan bangsa juga menjadi poin penting. Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa kerja sama lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan organisasi sosial harus diperkuat. Bakesbangpol berperan sebagai fasilitator dan penghubung antar unsur dalam menciptakan persatuan, menjaga toleransi, serta memperkuat ketahanan nasional di tingkat daerah. Di samping itu, penguatan peran masyarakat dalam kehidupan demokrasi melalui nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan penguatan lembaga demokrasi, meskipun tidak selalu tertulis secara rinci dalam tabel, tetap menjadi bagian penting dalam agenda Renstra Bakesbangpol. Tujuannya adalah membangun masyarakat yang lebih sadar politik, memahami hak-hak sipil, serta aktif berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Program pagu Renstra tahun 2025-2029 terdapat penambahan 6 subkegiatan yang mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 900.1-2850 Tahun 2025 yang baru, penambahan tersebut dari Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dan Program Peningkatan Peran Politik Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Poilitik. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan dari tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Pemahaman dan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM				Presentase Msyarakat Yang Menerapkan Hasil Pembinaan Kebebasan, Kesetaraan dan Kapasitas Lembaga Demokrasi		1. Aspek Penegakan Perda 2. Aspek Pemeliharaan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 3. Aspek Pemeliharaan Perlindungan Msyarakat 4. Aspek Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya Kesadaran Kolektif serta Peran Aktif Masyarakat dalam Membangun Kehidupan Sosial yang Berlandaskan Pancasila, Prinsip Demokrasi, dan Penghormatan terhadap HAM			Persenstase Potensi Konflik Yang Diselesaikan		Jumlah progress penanganan konflik/jumlah konflik yang ditangani X 100%
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks RB General pada Aplikasi SURABI JABAR
					Indeks Manajemen Resiko		Penilaian Maturitas Risiko Bakesbangpol oleh APIP Pemkab Bandung
				Tersedianya dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Nilai AKIP	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penilaian AKIP Bakesbangpol oleh APIP Pemkab Bandung
				Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
				Tersediannya dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD			
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
				Tersedianya dokumen keuangan perangkat daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Terlaksananya pembinaan pegawai perangkat daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu
				Terlaksananya monitoring evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai
				Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan
				Tersedianya operasional perkantoran	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
				Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah paket perlatan rumah tangga yang disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket perlatan rumah tangga yang disediakan
				Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan
				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
				Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
				Tersedianya bahan/material	Jumlah paket bahan/maetrial yang disediakan	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah paket bahan/maetrial yang disediakan
				Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasu SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasu SKPD
				Tersedianya operasional perkantoran	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Terlaksanya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
				Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
				Tersedianya operasional perkantoran	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik
				Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
				Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
				Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah saran dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipeliharan/direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saran dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipeliharan/direhabilitasi
			Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina/Jumlah Total x 100%
				Persentase pelaksanaan pendidikan ideologi		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Persentase pelaksanaan pendidikan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				pancasila dan karakter kebangsaan		Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
				Terlaksananya kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
				Terlaksananya pembinaan aktivitas	Laporan hasil pembinaan aktivitas kepaskibraan dan purnapaskibra	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibraan dan Purnapaskibra	Laporan hasil pembinaan aktivitas kepaskibraan dan purnapaskibra
				Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka
				Terlaksananya pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka duta pancasila	Laporan hasil pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka duta pancasila	Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan hasil pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka duta pancasila
				Terlaksananya penugasan purnapaskibraka duta pancasila	Laporan hasil pelaksanaan tugas purnapaskibraka duta pancasila	Pelaksanaan Tugas PurnapaskibrakaDuta Pancasila	Laporan hasil pelaksanaan tugas purnapaskibraka duta pancasila
				Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah purnapaskibraka duta pancasila	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah purnapaskibraka duta pancasila
			Meningkatnya Etika dan Budaya Politik		Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik Yang Terealisasi/Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik Yang Direncanakan x 100%
				Prosentase fasilitasi peningkatan pendidikan politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
					Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)
				Terlaksananya kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik DiDaerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah
				Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umu kepala daerah, serta pemataуan situasi politik di daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umu kepala daerah, serta pemataуan situasi politik di daerah

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan tugas paskibraka	Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan tugas paskibraka
			Meningkatnya ketertiban organisasi masyarakat		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Ormas Yang Menerima Hibah/Jumlah Ormas Yang Dibina x 100 %
				Persentase pelaksanaan pengawasan aktivitas Organisasi kemasyarakatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)
				Terlaksananya kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Pelaksanaan Kebijakan dibidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah
				Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendafatran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Tahan gangguan sosial	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah sekolah yang ada/yang dibina x 100%

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
					Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)		
				Persentase pelaksanaan pembinaan untuk pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)
				Terlaksananya kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase masyarakat yang mempunyai daya beli tinggi dan tahan terhadap ancaman narkotika, toleran terhadap pemeluk agama lain dan kepercayaan
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan		Persentase penanganan konflik sosial yang ditangani	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Progres Penangangan Konflik/Jumlah Konflik ditangani x 100%
				Persentase penanganan konflik sosial	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
					Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)
				Terlaksananya kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan oang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pematauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pematauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah
				Terlaksananya koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pematauan orang asing, tenaga asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daera	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pematauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pematauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pematauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaa, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pematauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaa, serta penanganan konflik di daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pematauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaa, serta penanganan konflik di daerah
				Terlaksananya forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota

Sumber : Hasil Analisis Bakesbangpol, 2025

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	82	82	10,322,668,650	82	10,912,057,000	82	10,912,057,000	82	10,912,057,000	82	10,912,057,000	S.5.2
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	94											
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP		70 point	125,927,000	70 point	125,927,000	70 point	125,927,000	70 point	125,927,000	70 point	125,927,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	4 dokumen	5,000,000	4 dokumen	5,000,000	4 dokumen	5,000,000	4 dokumen	5,000,000	4 dokumen	5,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 dokumen	3,500,000	2 dokumen	3,500,000	2 dokumen	3,500,000	2 dokumen	3,500,000	2 dokumen	3,500,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 dokumen	3,500,000	1 dokumen	3,500,000	1 dokumen	3,500,000	1 dokumen	3,500,000	1 dokumen	3,500,000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 dokumen	2,000,000	2 dokumen	2,000,000	2 dokumen	2,000,000	2 dokumen	2,000,000	2 dokumen	2,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2 dokumen	3,500,000	2 dokumen	3,500,000	2 dokumen	3,500,000	2 dokumen	3,500,000	2 dokumen	3,500,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	2 dokumen	55,000,000	2 dokumen	55,000,000	2 dokumen	55,000,000	2 dokumen	55,000,000	2 dokumen	55,000,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 dokumen	5,000,000	2 dokumen	5,000,000	2 dokumen	5,000,000	2 dokumen	5,000,000	2 dokumen	5,000,000	
Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	12 laporan	43,427,000	12 laporan	43,427,000	12 laporan	43,427,000	12 laporan	43,427,000	12 laporan	43,427,000	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	2 laporan	5,000,000	2 laporan	5,000,000	2 laporan	5,000,000	2 laporan	5,000,000	2 laporan	5,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu		70 point	8,314,677,000	70 point	8,314,677,000	70 point	8,314,677,000	70 point	8,314,677,000	70 point	8,314,677,000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Bulan	23 orang	8,284,677,000	23 orang	8,284,677,000	23 orang	8,284,677,000	23 orang	8,284,677,000	23 orang	8,284,677,000	

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1 laporan	15,000,000	1 laporan	15,000,000	1 laporan	15,000,000	1 laporan	15,000,000	1 laporan	15,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	2 laporan	15,000,000	2 laporan	15,000,000	2 laporan	15,000,000	2 laporan	15,000,000	2 laporan	15,000,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu		70 point	61,075,000	70 point	100,722,000	70 point	100,722,000	70 point	100,722,000	70 point	100,722,000	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	34 Orang											
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	21 Orang	23 Paket	32,375,000	23 orang	53,722,000	23 orang	53,722,000	23 orang	53,722,000	23 orang	53,722,000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	21 Orang	23 orang	28,700,000	23 orang	47,000,000	23 orang	47,000,000	23 orang	47,000,000	23 orang	47,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		70 point	165,387,698	70 point	335,802,888	70 point	335,802,888	70 point	335,802,888	70 point	335,802,888	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	35 Jenis	6 Paket	35,382,698	6 jenis	50,000,000	6 jenis	50,000,000	6 jenis	50,000,000	6 jenis	50,000,000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket perlatan rumah tangga yang disediakan	9 Jenis	10 Paket	5,000,000	10 jenis	15,000,000	10 jenis	15,000,000	10 jenis	15,000,000	10 jenis	15,000,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	250 OK	780 Paket	15,000,000	780 HOK	15,000,000	780 HOK	15,000,000	780 HOK	15,000,000	780 HOK	15,000,000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	14 Buah	14 Paket	5,000,000	14 buah	15,000,000	14 buah	15,000,000	14 buah	15,000,000	14 buah	15,000,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Jenis	4 Dokumen	5,000,000	4 jenis	15,000,000	4 jenis	15,000,000	4 jenis	15,000,000	4 jenis	15,000,000	
Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah paket bahan/maetrial yang disediakan	12 Jenis	12 Paket	5,000	12 jenis	5,000	12 jenis	5,000	12 jenis	5,000	12 jenis	5,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasu SKPD	400 HOK	264 HOK	100,000,000	264 HOK	225,797,888	264 HOK	225,797,888	264 HOK	225,797,888	264 HOK	225,797,888	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		70 point	1,328,808,952	70 point	1,412,628,112	70 point	1,412,628,112	70 point	1,412,628,112	70 point	1,412,628,112	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	400 Buah	400 buah	15,000,000	400 buah	15,000,000	400 buah	15,000,000	400 buah	15,000,000	400 buah	15,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Jenis	3 Laporan	80,000,000	3 jenis	80,000,000	3 jenis	80,000,000	3 jenis	80,000,000	3 jenis	80,000,000	

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Bulan	12 bulan	1,233,808,952	12 bulan	1,317,628,112	12 bulan	1,317,628,112	12 bulan	1,317,628,112	12 bulan	1,317,628,112	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik		70 point	326,793,000	70 point	622,300,000	70 point	622,300,000	70 point	622,300,000	70 point	622,300,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 Unit	9 unit	54,300,000	9 unit	54,300,000	9 unit	54,300,000	9 unit	54,300,000	9 unit	54,300,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	18 Unit	18 unit	15,530,000	18 unit	90,000,000	18 unit	90,000,000	18 unit	90,000,000	18 unit	90,000,000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saran dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipeliharan/direhabilitasi	1 Gedung	18 jenis dan jasa	256,963,000	18 jenis dan jasa	478,000,000	18 jenis dan jasa	478,000,000	18 jenis dan jasa	478,000,000	18 jenis dan jasa	478,000,000	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	60%	60%	1,250,000,000	60%	1,250,000,000	60%	1,250,000,000	60%	1,250,000,000	60%	1,250,000,000	S.5.2
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)			1,250,000,000		1,250,000,000		1,250,000,000		1,250,000,000		1,250,000,000	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	50 orang 250 orang 250 orang 50 orang 50 orang	100 orang	103,070,000	100 orang	103,070,000	100 orang	103,070,000	100 orang	103,070,000	100 orang	103,070,000	
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibraan dan Purnapaskibra	Laporan hasil pembinaan aktivitas kepaskibraan dan purnapaskibra		5 laporan	177,000,000	5 laporan	177,000,000	5 laporan	177,000,000	5 laporan	177,000,000	5 laporan	177,000,000	
Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka		35 orang	782,200,000	35 orang	782,200,000	35 orang	782,200,000	35 orang	782,200,000	35 orang	782,200,000	
Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan hasil pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka duta pancasila		3 laporan	100,730,000	3 laporan	100,730,000	3 laporan	100,730,000	3 laporan	100,730,000	3 laporan	100,730,000	
Pelaksanaan Tugas PurnapaskibrakaDuta Pancasila	Laporan hasil pelaksanaan tugas purnapaskibraka duta pancasila		6 laporan	42,000,000	6 laporan	42,000,000	6 laporan	42,000,000	6 laporan	42,000,000	6 laporan	42,000,000	
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah purnapaskibraka duta pancasila		orang	45,000,000	orang	45,000,000	orang	45,000,000	orang	45,000,000	orang	45,000,000	

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%	70%	70%	13,677,638,400	70%	3,041,994,400	70%	3,041,994,400	70%	3,041,994,400	70%	3,041,994,400	SDG's (TPB 5 dan TPB 16)
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)			13,677,638,400		3,041,994,400		3,041,994,400		3,041,994,400		3,041,994,400	
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik DiDaerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	250 Orang	5 laporan	13,641,638,400	5 laporan	3,005,994,400	5 laporan	3,005,994,400	5 laporan	3,005,994,400	5 laporan	3,005,994,400	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umu kepala daerah, serta pematauan situasi politik di daerah	3 Laporan	5 laporan	26,000,000	5 laporan	26,000,000	5 laporan	26,000,000	5 laporan	26,000,000	5 laporan	26,000,000	
Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan tugas paskibraka		2 kegiatan	10,000,000	2 kegiatan	10,000,000	2 kegiatan	10,000,000	2 kegiatan	10,000,000	2 kegiatan	10,000,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	70%	70%	3,217,181,600	70%	2,372,181,600	70%	2,372,181,600	70%	2,372,181,600	70%	2,372,181,600	S.5.2

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)			3,217,181,600		2,372,181,600		2,372,181,600		2,372,181,600		2,372,181,600	
Pelaksanaan Kebijakan dibidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	24 organisasi 200 orang	5	3,207,181,600	5	2,362,181,600	5	2,362,181,600	5	2,362,181,600	5	2,362,181,600	
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	3 Laporan	5	10,000,000	5	10,000,000	5	10,000,000	5	10,000,000	5	10,000,000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	70%	70%	150,000,000	70%	150,000,000	70%	150,000,000	70%	150,000,000	70%	150,000,000	S.5.2
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)			150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	100 orang 100 orang 200 orang	200 orang	150,000,000	200 orang	150,000,000	200 orang	150,000,000	200 orang	150,000,000	200 orang	150,000,000	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang ditangani	70%	70%	16,060,353,163	70%	4,908,235,000	70%	4,908,235,000	70%	4,908,235,000	70%	4,908,235,000	S.5.2
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)			16,060,353,163		4,908,235,000		4,908,235,000		4,908,235,000		4,908,235,000	

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pematauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	100 Orang	300	9,001,525,000	300	3,150,000,000	300	3,150,000,000	300	3,150,000,000	300	3,150,000,000	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pematauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	15 dokumen/laporan	8 laporan	5,550,593,163	8 laporan	250,000,000	8 laporan	250,000,000	8 laporan	250,000,000	8 laporan	250,000,000	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pematauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaa, serta penanganan konflik di daerah	15 dokumen/laporan	7 laporan	8,235,000	7 laporan	8,235,000	7 laporan	8,235,000	7 laporan	8,235,000	7 laporan	8,235,000	
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota	12 Bulan	7 laporan	1,500,000,000	7 laporan	1,500,000,000	7 laporan	1,500,000,000	7 laporan	1,500,000,000	7 laporan	1,500,000,000	
	JUMLAH			44,677,841,813		22,634,468,000		22,484,468,000		22,634,468,000		22,634,468,000	

Sumber : Hasil Analisis Bakesbangpol, 2025

Ket :
S.5.2 : Program yang Mendukung Sasaran KDH : Meningkatnya Stabilitas Kehidupan Bermasyarakat Berbasis Partisipatif

TPB 5 : Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan : Kesetaraan Gender

TPB 16 : Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan : Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh

4.2 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Bandung berisi program-program prioritas, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Program-program prioritas yang telah diserati kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daearah dalam penyususnan Rencana Stretegis perangkat daerah.

Untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, diperlukan perumusan subkegiatan yang terarah dan sesuai dengan tugas serta fungsi Bakesbangpol. Subkegiatan ini disusun berdasarkan keterkaitan dengan sasaran pembangunan daerah, terutama dalam penguatan ketahanan politik, pemantapan wawasan kebangsaan, fasilitasi kehidupan demokrasi, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial. Rincian subkegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut yang memuat program, kegiatan, dan subkegiatan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah, sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/SubKegiatan	Ket.
1	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya etika dan budaya politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
			Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	PN 1 & PN 8
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			pelaksanaan Tugas Paskibraka	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	PN 7
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
3	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/SubKegiatan	Ket.
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	R 53
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Perbatasan Antar Negara, Kewaspadaan Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	R 53
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	R 56

Sumber : Hasil Analisis Bakesbangpol,2025

Ket :
PN 1 : Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Astacita :Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
PN 7 : Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Astacita : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotka, judi, dan penyelundupan
PN 8 : Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Astacita : Memperkuat penyelarasan kehidupan yan harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
R.53 : Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Rencana Aksi Bupati : Mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib
R.56 : Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Rencana Aksi Bupati: Meningkatnyaa koordinasi FORKOPIMDA untuk mendorong stabilitas keamanan dan ketertiban

Dari Tabel 4.3 yang isinya tentang subkegiatan prioritas untuk mendukung program pembangunan daerah, bisa dilihat bahwa setiap program punya fokus yang cukup jelas dan relevan dengan kebutuhan sosial-politik saat ini.

Program pertama, yaitu Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, tujuannya untuk meningkatkan etika dan budaya politik. Kegiatannya cukup lengkap, mulai dari perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kegiatan pendidikan politik, sampai monitoring dan evaluasi. Semua itu diarahkan agar masyarakat, termasuk partai politik dan lembaga pendidikan, punya pemahaman dan praktik politik yang lebih etis dan demokratis. Bahkan kegiatan seperti pemantauan situasi politik dan pelibatan paskibraka juga masuk dalam upaya ini. Program kedua lebih fokus ke organisasi kemasyarakatan (ormas), dengan tujuan meningkatkan keterlibatan dan ketertiban ormas. Kegiatannya meliputi pengawasan, pendataan, pembinaan, hingga mediasi konflik antarormas. Ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin menjaga agar ormas tetap aktif, tapi tetap tertib dan tidak menjadi sumber konflik sosial.

Lalu, program ketiga menyasar isu konflik sosial, yaitu Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Program ini cukup luas karena mencakup kebijakan dan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, intelijen, pemantauan orang asing, hingga penanganan konflik langsung di daerah. Beberapa kegiatan spesifik seperti koordinasi antar instansi, pemantauan perbatasan, hingga forum pimpinan daerah, menunjukkan bahwa konflik sosial dianggap sebagai hal serius yang butuh pendekatan lintas sektor. Secara keseluruhan, isi tabel ini menggambarkan bahwa pemerintah, khususnya Bakesbangpol, punya strategi yang cukup menyeluruh. Bukan cuma fokus pada stabilitas politik dan keamanan, tetapi juga pada pembinaan etika politik dan pengawasan ormas, yang kalau dijalankan dengan baik bisa membantu menciptakan masyarakat yang lebih tertib, sadar politik, dan damai.

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 melalui IKU PD

Penetapan indikator kinerja daerah ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan . Hal ini ditunjukan oleh akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri tahunan. Dengan demikian, kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir periode Renstra dapat terukur secara objektif, terarah, dan berkesinambungan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung.

Perangkat daerah telah menetapkan indikator dan menjadikan indikator tujuan ini sebagai IKU. IKU di sini merupakan target pencapaian yang menjadi ukuran dan efektifitas dan efisiensi perangkat daerah secara umum. Melalui IKU tergambarkan bagaimana kinerja perangkat daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan perangkat daerah. Penetapan indikator sebagai IKU berkaitan dengan kompleksitas dari indikator tersebut sehingga dianggap strategis untuk dijadikan IKU.

Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja Bakesbangpol Kabupaten Bandung, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu. IKU Bakesbangpol Kabupaten Bandung yang melaksanakan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan, program peningkatan peran partai politik dan kembaga pendidikan melaui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, program pemberdayaan dan pengawasan organisasi

kemasyarakatan, program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, program peningkatan kewaspadaan nasioanal dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial dan program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung.

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persen	87%	80%	82%	84%	86%	88%	89%	Jumlah progress penanganan konflik/jumlah konflik yang ditangani X 100%
2	Persentase Masyarakat yang Menerapkan Hasil Pembinaan Kebebasan dan Kapasitas Lembaga Demokrasi	persen	64%	31.25 %	33.33 %	38.33%	41.67 %	42.86%	45.71 %	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dibina/Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang Melakukan Kegiatan dalam rangka Kebebasan berpendapat X 100%

Sumber : Hasil Analisis Bakesbangpol,2025

Berdasarkan Tabel 4.4 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, terlihat bahwa kinerja Bakesbangpol cukup fokus pada penanganan konflik sosial dan penguatan demokrasi di masyarakat. Indikator pertama adalah persentase potensi konflik sosial yang ditangani. Di tahun 2024, realisasi penanganan konflik sudah mencapai 87%, dan untuk tahun-tahun selanjutnya ditargetkan 89% terus-menerus hingga tahun 2030. Artinya, pemerintah daerah menargetkan agar setiap potensi konflik yang muncul dapat segera ditangani secara tuntas setiap tahunnya tanpa ada yang terlewat. Hal ini mencerminkan komitmen kuat Bakesbangpol dalam menjaga stabilitas sosial, keamanan, dan ketertiban umum sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan daerah.

Indikator kedua adalah persentase masyarakat yang menerapkan hasil pembinaan kebebasan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Di tahun 2024 realisasinya cukup tinggi, yaitu 64%, namun target tahun 2025 turun menjadi 31,25% dan meningkat perlahan tiap tahun hingga 45,71% di tahun 2030. Ini bisa jadi karena tahun 2024 merupakan hasil dari program sebelumnya, dan target ke depan disesuaikan lagi dengan arah kebijakan atau metode baru. Meski begitu, tren peningkatannya tetap menunjukkan arah yang positif dan terencana, di mana masyarakat diharapkan semakin aktif menerapkan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan secara bertahap. Secara umum, tabel ini menggambarkan

upaya Bakesbangpol dalam menjaga stabilitas daerah dan mendorong masyarakat agar lebih aktif dan sadar terhadap nilai-nilai demokrasi. Meski beberapa target masih bertahap, tapi arah kebijakannya sudah cukup jelas dan realistis.

4.3 Target Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Dalam rangka mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, diperlukan penetapan indikator kinerja kunci (IKK) yang menjadi tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Target kinerja tahun 2025–2029 difokuskan pada upaya penyelesaian konflik sosial serta peningkatan kualitas kehidupan demokrasi masyarakat melalui pembinaan kebebasan dan penguatan kapasitas lembaga demokrasi. Kedua indikator ini dituangkan dalam Tabel 4.5 sebagai dasar pengendalian, evaluasi, sekaligus arah pencapaian target kinerja Bakesbangpol Kabupaten Bandung.

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persen	87%	80%	82%	84%	86%	88%	89%	Jumlah progress penanganan konflik/jumlah konflik yang ditangani X 100%
2	Persentase Masyarakat yang Menerapkan Hasil Pembinaan Kebebasan dan Kapasitas Lembaga Demokrasi	persen	64%	31.25 %	33.33 %	38.33 %	41.67 %	42.86 %	45.71 %	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dibina/Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang Melakukan Kegiatan dalam rangka Kebebasan berpendapat X 100%

Tabel 4.5 ini menunjukkan indikator kinerja kunci dari Bakesbangpol, yang mencakup dua hal utama: penurunan potensi konflik sosial yang berhasil ditangani, dan peningkatan masyarakat yang menerapkan nilai-nilai demokrasi hasil pembinaan.

Indikator pertama, persentase konflik sosial yang diselesaikan, menunjukkan komitmen tinggi Bakesbangpol dalam menjaga stabilitas sosial daerah. Dengan realisasi tahun 2024 sebesar 87% dan target peningkatan bertahap dari 80% pada tahun 2025 menjadi 89% pada tahun 2030, indikator ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas deteksi dini, penanganan, dan penyelesaian konflik sosial secara tuntas melalui koordinasi lintas sektor.

Indikator kedua fokus pada persentase masyarakat yang menerapkan hasil pembinaan kebebasan, dan kapasitas lembaga

demokrasi. Target tahunannya meningkat secara bertahap, dari 31,25% di tahun 2025 hingga 45,71% di tahun 2030. Ini menunjukkan bahwa Bakesbangpol tidak hanya fokus pada penyelesaian konflik, tapi juga ingin mendorong masyarakat agar semakin sadar dan terlibat dalam kehidupan demokratis. Kenaikan yang bertahap ini mencerminkan pendekatan yang realistis, karena perubahan pola pikir dan budaya politik memang butuh proses. Secara keseluruhan, isi tabel ini menunjukkan arah kebijakan Bakesbangpol yang berimbang antara penanganan masalah langsung di lapangan dan pembinaan jangka panjang untuk membentuk masyarakat yang sadar hukum, demokratis, dan tertib dimana dua indikator ini penting karena saling berkaitan. Penanganan konflik sosial yang baik biasanya juga berdampak pada peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokratis. Kuncinya adalah menjaga kesinambungan program dan mengevaluasi hambatan-hambatan di lapangan agar target-target ini benar-benar bisa tercapai.

4.4 Uraian Indikator dan Target Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pelaksanaan TPB atau SDGs di daerah merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Setiap tujuan dan indikator dalam TPB menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Uraian indikator dan target berikut menggambarkan capaian yang ingin diwujudkan oleh daerah dalam kurun waktu 2025–2030, khususnya terkait dengan aspek kesetaraan gender serta penguatan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.6.

Tabel 4. 6 Indikator TPB/SDGs

No.	Tujuan/ *Goals*	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan 5 (Kesetaraan Gender)	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat. parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Persen	16.37	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	
	Tujuan 16- (Perdamaian, Keadilan dan kelembagaan Yang Tangguh)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Persen	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	

Berdasarkan Tabel 4.6 mengenai indikator TPB/SDGs, terdapat dua tujuan yang menjadi fokus, yaitu Tujuan 5 (Kesetaraan Gender) dan Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh). Untuk Tujuan 5, indikator yang digunakan adalah proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah, dan pemerintah daerah, dengan satuan persen. Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 16,37%, kemudian mengalami penurunan dan stabil pada angka 12,96% mulai tahun 2026 hingga 2030.

Untuk Tujuan 16, indikator yang digunakan adalah persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Targetnya relatif konstan pada 12,96% dari tahun 2025 hingga 2030. Konsistensi ini menggambarkan adanya fokus kebijakan pada pemeliharaan keterwakilan yang stabil sepanjang periode perencanaan, meskipun juga mencerminkan keterbatasan ambisi dalam mendorong akselerasi peningkatan representasi politik perempuan.

Kedua indikator tersebut memiliki keterkaitan erat dengan bidang pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, pembinaan politik dalam negeri, serta fasilitasi kehidupan demokrasi. Bakesbangpol memiliki peran penting dalam memfasilitasi pendidikan politik masyarakat, termasuk pengarusutamaan gender untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi aktif perempuan dalam politik dan pemerintahan. Peran tersebut juga diwujudkan melalui pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan, guna memastikan implementasi kebijakan afirmasi perempuan, misalnya keterwakilan 30% dalam kepengurusan partai politik maupun pencalonan anggota legislatif.

Dengan demikian, capaian indikator SDGs pada Tujuan 5 dan Tujuan 16 dapat dijadikan landasan dalam perumusan arah kebijakan, sasaran, serta program Bakesbangpol dalam Renstra. Hal ini sejalan dengan mandat Bakesbangpol untuk memelihara dan memperkuat kehidupan demokrasi, meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat, serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan global yang berorientasi pada kesetaraan gender dan penguatan lembaga demokrasi.

4.6 Dukungan Terhadap Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029

Dalam mendukung arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2025–2029, Bakesbangpol memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas daerah, memperkuat ketahanan sosial politik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menumbuhkan demokrasi yang sehat. Peran ini menjadi fondasi penting bagi tercapainya lima fokus utama pembangunan daerah, yaitu pembangunan manusia, ekonomi

berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik, ketahanan sosial budaya, serta lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Namun, masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu diatasi, seperti menurunnya kohesi sosial akibat polarisasi politik dan intoleransi, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi, terbatasnya literasi politik terutama di kalangan muda, serta belum optimalnya sinergi antar-lembaga dalam menjaga stabilitas dan ketertiban daerah. Untuk itu, tujuan yang ingin dicapai Bakesbangpol ke depan adalah mewujudkan stabilitas politik dan keamanan daerah yang kondusif, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila, serta mengembangkan sistem deteksi dini dan pencegahan konflik sosial yang efektif.

Keberhasilan pencapaian tujuan tersebut ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain ketersediaan data dan sistem informasi sosial politik yang akurat, peningkatan kapasitas aparatur Bakesbangpol, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, ormas, dan masyarakat, dukungan kebijakan serta pendanaan yang konsisten, dan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pembinaan dan literasi kebangsaan. Agar peran tersebut berjalan optimal, diperlukan kondisi yang mendukung, seperti stabilitas politik yang terjaga, dukungan regulasi dan anggaran yang memadai, kapasitas kelembagaan yang kuat, komunikasi publik yang terbuka, serta kemitraan strategis dengan berbagai elemen masyarakat. Dengan sinergi tersebut, Bakesbangpol diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam menjaga stabilitas, memperkuat demokrasi lokal, dan menciptakan suasana kondusif bagi keberlanjutan pembangunan Kabupaten Bandung.

Bakesbangpol dapat mendukung semua subtema pembangunan seperti berikut :

1. Peningkatan ketahanan pangan; dukungan berupa fasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas sosial dalam distribusi danproduksi pangan, mendeteksi konflik sosial yang bisa muncul akibat krisis pangan/kesenjagan akses pangan. Program pendukung terkait, yaitu program yang dilaksanakan untuk mendukung tema ketahanan pangan, meliputi kegiatan yang berfokus pada penguatan nilai gotong royong dalam menjaga ketahanan pangan, monitoring dan antisipasi potensi konflik akibat ketimpangan pangan, serta pelibatan FKDM dan FPK dalam penyusunan rekomendasi kebijakan sosial di bidang pangan.

2. Kawasan ekonomi terpadu; dukungan berupa mendorong stabilitas keamanan dan ketertiban di Kawasan ekonomi strategis, menjembatani komunikasi pemda dalam mengharmonisasikan peran masyarakat lokal dengan pelaku usaha/investor. Program terkait yaitu melalui koordinasi lintas sector di Kawasan ekonomi strategis, fasilitasi dialog sosial dan forum komunikasi pemerintah, investor, dan masyarakat untuk memperkuat sinergi pembangunan, dan pembinanan organisasi kemasyarakatan dan partai politik.
3. Pengembangan ibukota Bandung, khusunya di Soreang untuk menciptakan pusat pemerintahan yang tertib, nyaman, dan berkelanjutan; Bakesbangpol memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik dan ketertiban umum, sehingga pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial dapat berjalan kondusif.

   Tema Pembangunan Tematik 3 berfokus pada intervensi pembangunan di kawasan strategis Ibukota Kabupaten Bandung, khususnya Kecamatan Soreang, dengan tujuan mewujudkan kawasan perkotaan yang bersih, nyaman, tertib, aman, dan berkelanjutan melalui penguatan fungsi kawasan serta penataan ruang yang terintegrasi. Bakesbangpol memberikan dukungan strategis terhadap tematik ini melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada pemeliharaan stabilitas sosial, peningkatan partisipasi publik, dan penguatan ketahanan masyarakat. Dukungan tersebut meliputi: a. Penguatan Ketenteraman dan Ketertiban Sosial melalui upaya deteksi dini dan penanganan potensi konflik di wilayah strategis, termasuk yang terkait dengan penataan ruang, pemanfaatan lahan, dan dinamika sosial masyarakat. Langkah ini bertujuan memastikan lingkungan yang aman dan kondusif sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan Kawasan, b. Pembinaan Kesadaran Masyarakat melalui pendidikan politik, sosialisasi wawasan kebangsaan, dan penguatan nilai toleransi antarwarga. Kegiatan ini mendorong terbentuknya masyarakat yang disiplin, harmonis, dan berperan aktif menjaga keamanan lingkungan, c**.** Fasilitasi Partisipasi Publik dalam proses pembangunan kawasan ibukota melalui dialog, koordinasi, dan kemitraan antara pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan warga. Pendekatan ini memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi sekaligus meminimalkan potensi gesekan sosial, d. Penguatan Ketahanan Sosial dan Budaya dengan mengembangkan kegiatan yang memperkuat identitas lokal, semangat kebersamaan, dan toleransi antar kelompok. Hal ini diharapkan menciptakan keseimbangan antara pembangunan fisik dengan kohesi sosial yang solid. Dengan dukungan tersebut, Bakesbangpol berperan

memastikan bahwa pembangunan Kawasan Pengembangan Ibukota Kabupaten tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga didukung oleh stabilitas sosial, keamanan, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai pondasi utama keberlanjutan pembangunan. Program terkait yaitu, melalui penguatan ketentraman dan ketertiban sosial, pembinaan kesadaran masyarakat melalui pendidikan politik sosialisasi wawasan kebangsaan, dan penguatan nilai toleransi untuk membangun masyarakat yang disiplin dan harmonis, fasilitasi partisipasi publik, dan penguatan ketahanan sosial dan budaya.

4. Peningkatan SDM BEDAS; dukungan berupa pembinaan wawasan kebangsaan, bela negara, dan Pendidikan politik kepada generasi muda, ASN, dan masyarakat. Memfasilitasi pembentukan karakter SDM yang cinta tanah air dan demokratis. Program terkait yaitu, pelatihan kader bela negara, dialog kebangsaan, dan kegiatan sosialisasi empat pilar, program Pendidikan politik dan demokrasi sehat, dan program penguatan kapasitas ASN dan tokoh masyarakat.
5. Pengelolaan lingkungan berkualitas; dukungan berupa mendeteksi potensi konflik sosial-lingkungan (misalnya dalam kasus pencemaran, alih fungsi lahan, dan pembangunan yang merusak lingkungan) oknum-oknum yang tidak memiliki izin tetapi menimbulkan masalah lingkungan. Program terkait yaitu, program kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial, program fasilitasi dialog dan mediasi sosial, dan program sosialisasi wawasan kebangsaan.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penetapan IKU pada Bakesbangpol Kabupaten Bandung merupakan langkah strategis dalam mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir masa jabatan. IKU disusun berdasarkan indikator yang bersifat strategis, relevan, dan mampu merepresentasikan capaian outcome program pembangunan daerah secara akuntabel. Melalui IKU, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat diukur secara terarah, objektif, dan berkesinambungan.

Berbagai program Bakesbangpol, seperti penguatan ideologi Pancasila, peningkatan peran partai politik, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, pembinaan ketahanan sosial budaya, serta peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial, diarahkan untuk mendukung pencapaian target kinerja sekaligus meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, prinsip demokrasi, dan penghormatan terhadap HAM.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada RPJMD, RPJPD, serta Renstra K/L dan Provinsi**,** dengan berpedoman pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan Inmendagri No. 2 Tahun 2025**,** sehingga pelaksanaan kinerja Bakesbangpol selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan harus berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, partisipasi, serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja secara terukur, memperhatikan prioritas pembangunan daerah, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Anggaran dialokasikan sesuai dengan kebutuhan riil pengembangan daerah, sehingga setiap pelaksanaan kegiatan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi perencanaan serta pelaksanaan pembangunan dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan capaian di lapangan. Pengendalian dilaksanakan melalui monitoring progres pelaksanaan kegiatan, pemantauan serapan anggaran, serta identifikasi permasalahan yang muncul. Evaluasi dilakukan untuk

menilai efektivitas program, mengukur pencapaian indikator kinerja, dan memberikan rekomendasi perbaikan bagi periode selanjutnya.

Melalui pengendalian dan evaluasi yang konsisten, diharapkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat terus ditingkatkan, sehingga program Bakesbangpol Kabupaten Bandung mampu berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah yang bersih, aman, tertib, dan berkelanjutan.

Soreang, September 2025
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ttd

BAMBANG SUKMAWIJAYA

BUPATI BANDUNG

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Jabatan Struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 16
Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025 16
Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan Golongan Tahun 2025 17
Tabel 2. 4 Rekapitulasi Barang Inventaris Bakesbangpol Kabupaten Bandung 2024 18
Tabel 2. 5 Klasifikasi BMD 19
Tabel 2. 6 Daftar Inventaris Aset 21
Tabel 2. 7 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 24
Tabel 2. 8 Hasil Evaluasi Capaian Kinerja 25
Tabel 2. 9 Pohon Masalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 40
Tabel 2. 10 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah 42
Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Bakesbangpol 47
Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah 49
Tabel 3. 3 Penyajian Lokus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 50
Tabel 3. 4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 51
Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD 55
Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan 66
Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan 72
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama PD 75
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci PD 76
Tabel 4. 6 Indikator TPB/SDGs 77

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15